



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 45 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TAHUN 2022.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja Dinas Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
- BAB V : PENUTUP

(2) Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**NURDINYANA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 45**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL  
TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah dokumen rencana pembangunan Dinas Sosial untuk periode 1 (satu) tahun yang penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2022 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2022 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, perubahan secara umum yang dikarenakan dampak dari pandemic Covid 19 yang menyebabkan dilakukannya refocusing anggaran pada tahun 2020 untuk pemenuhan kebutuhan penanganan Covid 19 meliputi kesehatan, jarring pengaman sosial, penanganan dampak ekonomi bagi masyarakat miskin dan pra miskin dan operasional gugus tugas.

Proses penyusunan Renja Dinas sosial Kabupaten Garut mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu, Renja Dinas Sosial Kabupaten Garut disusun bersamaan dengan

penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial Kabupaten Garut, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra .

Renja merupakan dasar pedoman untuk penyusunan rencana anggaran Dinas Sosial sehingga memiliki konsekuensi bahwa Rencana Kerja, program dan kegiatan harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

#### ✦ Pengertian Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupten Garut tahun 2022 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Garut Tamban Tahun 2019 – 2024.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Dinas Sosial) Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan dokumen yang berisikan usulan program kerja berikut perkiraan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun ke tiga RPJMD 2019 – 2024. Dokumen ini disusun mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 yang telah disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor ..... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019 - 2024.

Sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024 **“GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”**, kemudian untuk penjabarannya disusun Misi Pemerintah Kabupaten Garut sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya ;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih ;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang ;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial yang berisikan penjabaran Renstra 2019 - 2024 dan merupakan salah satu bahan dari Dinas Sosial yang akan digunakan untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2022.

Selain dari itu, penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2022 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi di tahun pelaksanaan Rencana Kerja (Renja). Dalam proses penyusunannya, dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2022 telah mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan dan sinergisitas



dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu dan saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

✦ **Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja)**

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Sosial mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Sosial dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Sosial dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas Sosial menetapkan Renja Dinas Sosial untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Sosial dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Dinas Sosial pada tahun anggaran berkenaan.

✦ **Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

Rencana Kerja Dinas Sosial sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena

sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28B, 33, dan 34;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 4 Juli 1950)jo. Undang- undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintah Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44744) ;
3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
4. Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273) ;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembar Negara Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi (KPK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
  14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  15. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  17. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270) ;
  18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;
  19. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa DanTanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023) ;

20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) ;
21. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) ;
22. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
24. Undang-Undang Ri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;

29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Sosial ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
34. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2015-2019 ;
36. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
37. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ;
38. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan anak ;
39. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
41. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) ;
44. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 ;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah :

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah ;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ;
49. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor ..... Tahun ..... tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor ....) ;
50. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor .... Tahun..... tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor.....) ;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4) ;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Garut Nomor 3) ;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;
54. Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Garut ;
55. Peraturan Bupati Garut Nomor 145 tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Garut ;



56. Peraturan Bupati Garut Nomor 42 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Garut tahun 2021 :

57. Keputusan Bupati Garut Nomor 400/Kep.180. Bappeda/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan .

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Berdasarkan pertimbangan diatas, Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Garut ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan Kesejahteraan Sosial (penanganan Kemiskinan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS) tahun 2022 ;
- b. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan kesejahteraan sosial ;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan kesejahteraan sosial (penanganan Kemiskinan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS) ;
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan ;
- e. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2022 ;
- f. Menjelaskan rumusan prioritas pembangunan, program, sasaran program, indikasi kegiatan, lokasi, sumber dana dan pelaksana kegiatan ;

- g. Sebagai acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan secara teknis administratif dalam kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), serta sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 ;
- h. Memberikan prespektif mengenai apa yang ingin dihasilkan ke depan ;
- i. Memberikan gambaran tentang target apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan ;
- j. Penjabaran dalam penanganan dampak Covid 19 yang berkaitan dengan penanganan bidang sosial, Jaring Pangaman Sosial.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Garut adalah :

- a. Merupakan bagian dari Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan tahapan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahun;
- b. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah di bidang kesejahteraan sosial (penanganan Kemiskinan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS) ;

- c. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap program pada Dinas Sosial Kabupaten Garut ;
- d. Memudahkan seluruh pengelolaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur ;
- e. Memudahkan seluruh pengelola program dan kegiatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan oprasional tahunan ;
- f. Membantu monitoring dan evaluasi kinerja serta membantu menetapkan kinerja periode berikutnya.

#### **1.4 Hubungan Renja Dinas Sosial dengan Dokumen Perencanaan**

##### **Lainnya**

Rencana Kerja Dinas Sosial sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Hubungan Renja Dinas Sosial Kabupaten Garut dengan Dokumen Perencanaan lainnya, yaitu selain memperhatikan RPJMD dan RPJPD Kabupaten Garut, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yakni Renstra Kementerian Sosial RI .

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2022, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Hubungan Renja Dinas Sosial dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL**

- 4.1. Rencana Kegiatan 2022

### **BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENNJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial.**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Garut tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2022, mengacu kepada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan / atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan pada bab ini, antara lain :

- Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
- Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang harus disajikan adalah Tabel T-C. 29

**Tabel 2.1 (T-C. 29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2020 dan**  
**Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2022**  
**Jawa Barat Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>									
<b>I</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial</b>	<b>0,48</b>					<b>0,48</b>		
1.	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak nakal korban narkoba (ANKN)	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak nakal korban narkoba (ANKN)	15	15	42	15	0,35	15	45	100
2	Pemberian Permakanan Bagi Anak Asuh Terlantar Dalam Panti	Jumlah anak panti yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	20	20	30	20	0,66	20	60	100
3	Pemberian Pendidikan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dapat dibina dan dilatih serta trampil	408	408	55	408	7,14	408	1224	100
4	Fasilitasi dan asistensi kesejahteraan sosial bagi orang dengan HIV/AIDS	Jumlah orang dengan HIV/AIDS yang dibantu kesehatannya	40	40	55	40	0,72	40	120	100
5	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi WTS (Wanita Tuna Sosial) diluar panti.	Jumlah eks Wanita Tuna Sosial (WTS) yang mendapatkan dan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan	15	15	55	15	0,27	15	45	100
6	Peningkatan sarana dan prasarana dalam penanganan gelandangan dan pegemis (DESAKU MEATI).	Tersedianya bangunan dan gedung untuk penangana gelandangan dan pengemis	1	1	30	1	0,03	1	3	100
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar/Jalanan Diluar Panti	Jumlh anak terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya .	190	190	45	190	4,22	190	570	100
8	Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang cacat/disabilitas diluar panti	Jumlah penyandang cacat/disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	140	140	100	140	1,01	140	280	100
9	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis diluar panti.	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	75	75	42	75	1,78	75	150	100
10	Rehabilitasi sosial lanjut usia (LU) terlantar diluar panti	jumlah lanjut usia (LU) yang terpenuhi kebutuhannya	350	350	30	350	11,66	350	700	100
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan sosial</b>	<b>13,60%</b>							
1	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (Trafficking)	Jumlah korban trafficking, tindak kekerasan yang dilatih dan mendapatkan bantuan	20	20	20	20	100	20	60	100

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping PKH yang mampu meningkatkan pelayanan pada KPM	384,16, 6	384,16, 6	384,16, 6	384,16, 6	100	384,16, 6	1218	100
3	Pelatihan keterampilan bagi PPKS migran bermasalah.	Jumlah miran yang bermasalah dilatih	20	20	20	20	100	20	60	100
4	Perlindungan sosia korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan	3000, 200, 61, 200	3000, 200, 61, 200	3000, 200, 61, 200	3000, 200, 61, 200	100	3000, 200, 61, 200	10383	100
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Meningkatnya PPKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial</b>	<b>0,03%</b>							
1	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang dilatih	400	400	400	400	100	400	1200	100
2	Pelatihan keterampilan bagi PPKS Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang dilatih	90	90	90	90	100	90	270	100
3	Keluarga rentan ekonomi (asistensi Kesejahteraan sosial keluarga)	Jumlah keluarga rentan ekonomi yang dilatih	40	40	40	40	100	40	120	100
4	Peningkatan kemampuanpetugas dan pendamping sosial pemberdayaan FM	Jumlah petuga dan pendamping sosial pemberdayaan yang trampil	50	50	50	50	100	50	150	100
5	Pendampingan program bantuan pangan non tunai (BPNT)	Jumlah kelauga penerima manfaat yang terdampingi	50	50	50	50	100	50	150	100
6	Validasi dan keluarga miskin	Tersedianya jumlah data fakir miskin yang akurat dan valid	1	1	1	1	100	1	3	100
7	Penyusunan data PPKS	Tersedianya data PPKS yang valid	1	1	1	1	100	1	3	100
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN JARINGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>Meningkatnya PSKS yang aktif dalam kesejahteraan sosial</b>	<b>14,00</b>				<b>34,95</b>			
1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial (Karang Taruna dan PSM)	Jumlah KT dan PSM yang trampil dalam pelayanan pada KPM	30, 80, 42, 1	30, 80, 42, 1	30, 80, 42, 1	30, 80, 42, 1	100	30, 80, 42, 1	459	100
2	Sosialisasi perundang-undangan bidang sosial	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan bidang sosial	160	160	160	160	100	160	480	100
3	Bimbingan sosial bagi PSKS	Jumlah PSKS yang dilatih dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	35	35	35	35	100	35	105	100
4	Akreditasi yayasan di kabupaten garut	Jumlah yayasan/LKS yang terakreditasi	25	25	25	25	100	25	75	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	Layanan terpadu Rumah Harapan Masyarakat (LAPAD RUHAMA)	Jumlah masyarakat miskin yang dilayani melalui (LAPAD RUHAMA)	442	442	442	442	100	442	1326	100
6	Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan dan perintis kemerdekaan	Jumlah pelajar yang mengetahui nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan serta terpenuhinya kebutuhan dasar janda PKRI	100, 20	100, 20	100, 20	100, 20	100	100, 20	360	100
7	Peningkatan fasilitasi nilai-nilai keperintidan dan kepahlawanan	Jumlah buku nilai-nilai kepahlawanan dan perintis kemerdekaan	100	100	100	100	100	100	300	100
<b>V</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Presentasi aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial</b>	<b>80%</b>					<b>80%</b>		
1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa oprasional sumber daya air dan listrik	12	12	12	12	100	12	36	100
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /oprasional	Jumlah kendaraan dinas yang telah membayar pajak kendaraan	11	11	11	11	100	11	33	100
3	Penyediaan Jasa Kebersiahn Kantor	Jumlah petugas kebersihan	72	72	72	72	100	72	218	100
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang berfungsi baik	60	60	60	60	100	60	33	100
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	720	720	720	720	100	720	140	100
6	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	12	12	12	100	12	24	100
7	Penediaan kompone instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	108	108	108	108	100	108	324	100
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat alat dan perlengkapan kantor yang memadai.	8	8	8	8	100	8	24	100
9	Penyediaan peralatan rumaha tangga	Jumlah peralatan rumah tangga pada dinas	25	25	25	25	100	25	75	100
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan perundang-undangan dan informasi kerja yang dibutuhkan	48	48	48	48	100	48	144	100
11	Penyediaan makan dan minum	Jumlah tersedianya makan dan minum tamu serta makan minum rapat	1016	1016	1016	1016	100	1016	3048	100
12	Rapat-rapat konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12	12	12	12	100	12	36	100



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
13	Rapat-rapat pembinaan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	12	12	12	12	100	12		
<b>V</b>	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan bidang sosial</b>	<b>80%</b>					<b>80%</b>		
1	Pengadaan kendaraan dinas/Oprasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang tersedia	2	2	2	2	100	2	6	100
2	Pengadaan perlengkapan gedung/kantor	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai	5	5	5	5	100	5	15	100
3	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor tempat kerja	1	1	1	1	100	1	3	100
4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /oprasional	Jumlah kendaraan dinas yang berfungsi	20	20	20	20	100	20		
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Meningkatnya kinerja ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan bidang sosial</b>	<b>80%</b>					<b>80%</b>		
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas TKSK dan TAGANA	116	116	116	116	100	116		
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja SKPD</b>	<b>80%</b>							
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan bulanan, triwulan dan LAKIP	1	1	1	1	100	1	3	100
2	Penyusunan standar oprasional prosedur (SOP) dan pengukuran IKM	Jumlah dokumen survei kepuasan masyarakat (SKM)	2	2	2	2	100	2	6	100

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial yang disesuaikan menurut SKPD masing-masing, dengan format Tabel T-C.30.

**Tabel 2.2 (T-C 30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas sosial**  
**Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut**

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TAREGT RESNTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021 (THN - N2)	TAHUN 2020 (THN-N1)	TAHUN 2022 (THUN N)	TAHUN 2023 (THN+N1)	TAHUN 2021 (THN -2)	TAHUN 2020 (THN -1)	TAHUN 2022 (THN N)	TAHUN 2023 (THN N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang anak telantar/jalanan diluar panti ;	<b>Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki anti</b>	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	100	100	100	0,00	80%	80%	80%	
2	Rehabilita Dasar Bagi Penyandang Cacat/Disabilitas di luar panti	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	80%	80%	80%	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	81%	81%	81%	
4	Rehabiaalitasi Sosial Lanjut Usia (LU) terlantar diluar panti	Jumlah Lanjut Usia (LU) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	78,96%	78,96%	78,96%	
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	77,50%	77,50%	77,50%	

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TAREGT RESNTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021 (THN - N2)	TAHUN 2020 (THN-N1)	TAHUN 2022 (THUN N)	TAHUN 2023 (THN+N1)	TAHUN 2021 (THN -2)	TAHUN 2020 (THN -1)	tAHUN 2022 (THN N)	tAHUN 2023 (THN N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Jumlah data penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM</b>	Persentase penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	100	100	100	0,00	83,00%	85,00%	85,00%	
		Jumlah Penyangang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	83,96%	83,00%	83,00%	
		Jumlah anak terlantar/jalanan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	78,96%	78,00%	78,00%	
		Jumlah Lanjut Usia (LU) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	80,59%	80,00%	80,00%	
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	77,50%	77,00%	77,00%	
		Jumlah penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		100	100	100	100	0,00	80,14%	80,00%	80,00%	

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TAREGT RESNTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021 (THN - N2)	TAHUN 2020 (THN-N1)	TAHUN 2022 (THUN N)	TAHUN 2023 (THN+N1)	TAHUN 2021 (THN -2)	TAHUN 2020 (THN -1)	tAHUN 2022 (THN N)	tAHUN 2023 (THN N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</b>	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	100	100	100	0,00	82,70%	82,70%	82,70%	
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	82,70%	82,70%	82,70%	
		Jumlah anak terlantar/jalanan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	87,85%	87,85%	87,85%	
		Jumlah Lanjut Usia (LU) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	72,43%	72,43%	72,43%	
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	77,50%	77,50%	77,50%	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		100	100	100	100	0,00	68,34%	68,34%	68,34%	

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TAREGT RESNTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021 (THN - N2)	TAHUN 2020 (THN-N1)	TAHUN 2022 (THUN N)	TAHUN 2023 (THN+N1)	TAHUN 2021 (THN -2)	TAHUN 2020 (THN -1)	tAHUN 2022 (THN N)	tAHUN 2023 (THN N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket</b>	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	100	100	100	0,00	83,96%	83,96%	83,96%	
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	83,96%	83,96%	83,96%	
		Jumlah Lanjut Usia (LU) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	72,43%	72,43%	72,43%	
		Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	87,85%	87,85%	87,85%	
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	77,50%	77,50%	77,50%	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket		100	100	100	100	0,00	80,14%	80,14%	80,14%	

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TAREGT RESNTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021 (THN - N2)	TAHUN 2020 (THN-N1)	TAHUN 2022 (THUN N)	TAHUN 2023 (THN+N1)	TAHUN 2021 (THN -2)	TAHUN 2020 (THN -1)	tAHUN 2022 (THN N)	tAHUN 2023 (THN N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang</b>	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	100	100	100	0,00	83,96%	83,96%	83,96%	
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	83,96%	83,96%	83,96%	
		Jumlah anak terlantar/jalanan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	87,85%	87,85%	87,85%	
		Jumlah Lanjut Usia (LU) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	72,43%	72,43%	72,43%	
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	77,50%	77,50%	77,50%	
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	80,14%	80,14%	80,14%	

NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TAREGT RESNTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021 (THN - N2)	TAHUN 2020 (THN-N1)	TAHUN 2022 (THUN N)	TAHUN 2023 (THN+N1)	TAHUN 2021 (THN -2)	TAHUN 2020 (THN -1)	TAHUN 2022 (THN N)	TAHUN 2023 (THN N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu</b>	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	100	100	100	0,00	83,96%	83,96%	83,96%	
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	83,96%	83,96%	83,96%	
		Jumlah anak terlantar/jalanan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	87,85%	87,85%	87,85%	
		Jumlah Lanjut Usia (LU) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	87,85%	87,85%	87,85%	
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100	100	100	100	0,00	72,43%	72,43%	72,43%	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		100	100	100	100	0,00	80,14%	80,14%	80,14%	



NO.	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TAREGT RESNTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021 (THN - N2)	TAHUN 2020 (THN-N1)	TAHUN 2022 (THUN N)	TAHUN 2023 (THN+N1)	TAHUN 2021 (THN -2)	TAHUN 2020 (THN -1)	tAHUN 2022 (THN N)	tAHUN 2023 (THN N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan</b>	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	100	100	0,00	100%	100%	100%	
		Mendapatkan Permakanan		100	100	100	100	0,00	100%	100%	100%	

Perbandingan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Garut tahun 2020 terhadap Rencana Strategis 2019-2024, adalah sebagai berikut :  
Pencapaian sasaran tahun 2020 yang berkaitan dengan masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Misi 1**

**Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya**

<b>No.</b>	<b>Sasaran dan Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
1.	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran.  <b>Indikator sasaran ;</b>  Persentase Penduduk Miksin	%	8,35	9,98	9,98

pandemi COVID-19 dimulai dari adanya guncangan terhadap suplai barang dan jasa yang tersedia di pasar (supply shock). Guncangan tersebut terjadi ketika orang-orang (mayoritas pekerja) dalam rantai produksi terinfeksi virus dan kemudian sakit. Kondisi ini menyebabkan penurunan tingkat produktivitas individu ataupun perusahaan. Guncangan terhadap suplai juga didorong oleh pembatasan aktivitas fisik (physical distancing) ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bagian dari upaya pengendalian penyebaran pandemi. Dua kebijakan tersebut mengakibatkan banyak pabrik, kantor, dan pusat bisnis ditutup untuk sementara.

**Tabel 2.3**  
**Target dan Realisasi Program/Indikator Kinerja Program**  
**Dinas Sosial Tahun 2020**

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target 2020 (%)	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	
1.	PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi social	0,48%	0,77	
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persenttase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social	13,60%	36,52	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pemberdayaan social	0,03%	29,89	
4.	PROGRAM PEMBINAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN JARINGAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam kesejahteraan social	14,00	34,95	

Pencapaian kinerja tahun 2020 yang diimplementasikan ke dalam 49 kegiatan dengan 8 program, yaitu :

1. Program Pelayanan Rehaabilitasi Sosial ;
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
3. Program Pemberdayaan Sosial ;
4. Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaring Kesetiakawanan Sosial ;
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
6. Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur:
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
8. Program Peningkatan pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan:

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2020 dapat dilihat melalui capaian indikator kinerjanya dengan menggunakan formulasi/rumus yaitu :

- a. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Jumlah populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti dikali Seratus Persen (100%);
- b. Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota dikali Seratus Persen (100%).

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2020 ditunjukkan pada tabel berikut ;

**Tabel 2.4**  
**Target Sasaran Pencapaian SPM Bidang Sosial tahun 2020**

<b>No</b>	<b>JENIS PELAYANAN DASAR</b>	<b>SASARAN/INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>SASARAN :</b> Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak teralantar, lanjut usia teralantar, serta gelandangan dan pengemis diluar panti		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar/Jalanan Diluar Panti	<b>INDIKATOR :</b> Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang anak telantar/jalanan diluar panti ;	100	
2	Rehabilitasi Dasar Bagi Penyandang Cacat/Disabilitas di luar panti	<b>INDIKATOR :</b> Terpenuhinya kebutuhan dsasar bagi penyandang cacat/disabilitas terlantar diluar panti ;	100	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar panti	<b>INDIKATOR :</b> Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis terlantar diluar panti ;	100	
4	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LU) terlantar diluar panti	<b>INDIKATOR :</b> Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia diluar panti ;	100	
<b>B</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>SASARAN :</b> Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	<b>INDIKATOR :</b> Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100	

Target Pencapaian SPM dan Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Garut tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Target Pencapaian SPM**

<b>No</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>Sasaran Dalam Tahun</b>	<b>Target Dalam Tahun</b>	<b>Ket.</b>
1	<b>Penyandang Disabilitas Terlantar</b>			
	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	550 org	100	
2	<b>Rehabilitasi Anak Terlantar</b>			
	Jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.779 org	100	
3	<b>Rehabilitasi Lanjut Usia Terlantar</b>			
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan	1.632 org	100	
4	<b>Rehabilitasi Gelandang dan Pengemis</b>			
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi	217 org	100	
5	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>			
	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya .	3.217 org	100	

**Tabel 2.6**  
**JUMLAH LAYANAN DATA DAN PENGADUAN YANG DIMILIKI**

NO	URUSAN	IKK	NO IKK	RUMUSAN DAN PERMASALAHAN	CAPAIAN KINERJA	KEt.
	Bidang Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		
		<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</b>	A	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
		(4178 Orang : 5213Orang x 100) = 80,14 %		(550 orang : 655 orang x 100) =	80%	Dinas Sosial
			B	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
				(1632 Orang:2025 Orangx100) =	81%	Dinas Sosial
			C	Jumlah Lanjut Usia (LU) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
				(1779 Orang:2253 Orangx100) =	78,96%	Dinas Sosial
			D	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
				(217 Orang:280 Orang x100) =	77,50%	Dinas Sosial

**Tabel 2.7**  
**JUMLAH DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT**  
**USIA TERLANTAR DAN GEPENG YANG MASUK DALAM DATA TERPADU FM DAN OTM**

NO	URUSAN	IKK	NO IKK	RUMUSAN DAN PERMASALAHAN	CAPAIAN KINERJA	KET
1	2	3		4	5	6
	Bidang Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	2	<b>Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM</b>		
			A	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				(550 orang : 655 orang x 100) =	83,96%	Dinas Sosial
			B	<b>Jumlah anak terlantar/jalanan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				(1779 Orang:2253 Orangx100) =	78,96%	Dinas Sosial
			C	<b>Jumlah Lanjut Usia (LU) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				(1632 Orang:2025 Orangx100) =	80,59%	Dinas Sosial



NO	URUSAN	IKK	NO IKK	RUMUSAN DAN PERMASALAHAN	CAPAIAN KINERJA	KET
1	2	3	4		5	6
			D	<b>Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				(217 Orang:280 Orang x100) =	77,50%	Dinas Sosial
			E	<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</b>		
				(4178 Orang : 5213 Orang x 100) =	80,14%	Dinas Sosial

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk**

NO	URUSAN	IKK	NO IKK	RUMUSAN DAN PERMASALAHAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
1	2	3	4		5	6
	Bidang Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	3	<b>Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk</b>		
			1	TARUNA SIAGA BENCANA TAGAN		
				61 Orang		Dinas Sosial

**TABEL 2.9**  
**JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR,**  
**LANJUT USIA TERLANTAR DAN GEPENG YANG DIJANGKAU**

NO	URUSAN	IKK	NO IKK	RUMUSAN DAN PERMASALAHAN	CAPAIAN KINERJA	KET
1	2	3	4	5	6	
	Bidang Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	<b>4</b>	<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</b>		
			<b>A</b>	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				(550 orang : 655 orang x 100) =	82,70%	Dinas Sosial
			<b>B</b>	<b>Jumlah anak terlantar/jalanan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				(1779 Orang:2025 Orangx100) =	87,85%	Dinas Sosial
			<b>C</b>	<b>Jumlah Lanjut Usia (LU) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				(1632 Orang:2253 Orangx100) =	72,43%	Dinas Sosial
			<b>D</b>	<b>Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				(217 Orang:280 Orang x100) =	77,50%	Dinas Sosial
			<b>E</b>	<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau</b>		
				(4178 Orang : 6113 Orang x 100) =	68,34%	Dinas Sosial

**Tabel 2.10**  
**JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR,**  
**LANJUT USIA TERLANTAR DAN GEPENG YANG MENERIMA PAKET**

NO	URUSAN	IKK	NO IKK	RUMUSAN DAN PERMASALAHAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
1	2	3		4	5	6
	Bidang Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	<b>6</b>	<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket</b>		
			<b>A</b>	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				550 orang : 655 orang x 100 =	83,96%	Dinas Sosial
			<b>B</b>	<b>Jumlah Lanjut Usia (LU) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				1632 Orang:2253 Orangx100=	72,43%	Dinas Sosial
			<b>C</b>	<b>Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				1779 Orang:2025 Orangx100=	87,85%	Dinas Sosial
			<b>D</b>	<b>Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				(217 Orang:280 Orang x100) =	77,50%	Dinas Sosial
			<b>E</b>	<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket</b>		
				(4178 Orang : 5213 Orang x 100) =	80,14%	Dinas Sosial

**Tabel 2.11**  
**JUMLAH KENDARAAN RODA EMPAT YANG AKSES KHUSUS LAYANAN**  
**KEDARURATAN YANG DIMILIKI TAHUN 2020**

NO	URUSAN	IKK	NO IKK	RUMUSAN DAN PERMASALAHAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
	Bidang Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	5	<b>Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki</b>		
			1	KENDARAAN DINAS PELAYANAN 2 UNIT (4 UNIT :5 UNIT X 100) =		
			2	KENDARAAN PELAYANAN AIR BERSIH TENGKI 1 UNIT		Dinas Sosial
			3	KENDARAAN PELAYANAN DAPUR UMUM 1 UNIT		
			4	PERAHU KARET 1 BUAH		
			5	KENDARAAN RESUCE 1 UNIT		
				(4 UNIT :5 UNIT X 100) =	80,00%	

**Tabel 2.12**  
**JUMLAH KENDARAAN RODA EMPAT YANG AKSES KHUSUS LAYANAN**  
**KEDARURATAN YANG DIMILIKI**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	KENDARAAN DINAS PELAYANAN	2	UNIT
2	KENDARAAN PELAYANAN AIR BERSIH TENGKI	1	UNIT
3	KENDARAAN PELAYANAN DAPUR UMUM	1	UNIT
4	KENDARAAN RESUCE	1	UNIT
5	PERAHU KARET	1	UNIT

Tabel 2.13

**JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GEPENG YANG MENERIMA PAKET SANDANG**

NO	URUSAN	IKK	NO IKK	RUMUSAN DAN PERMASALAHAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
1	2	3		4	5	6
	Bidang Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	<b>8</b>	<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang</b>		
			<b>A</b>	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				(550 Orang:655 Orangx100)=	83,96%	Dinas Sosial
			<b>B</b>	<b>Jumlah anak terlantar/jalanan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				1779 Orang:2025Orangx100=	87,85%	Dinas Sosial
			<b>C</b>	<b>Jumlah Lanjut Usia (LU) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				1632 Orang:2253 Orangx100 =	72,43%	Dinas Sosial
			<b>D</b>	<b>Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				217 Orang:280 Orangx100) =	77,50%	Dinas Sosial
			<b>E</b>	<b>Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		
				(4178 Orang : 5213 Orang x 100) =	80,14%	Dinas Sosial

**Tabel 2.14**  
**JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GEPENG YANG MEMANFAATKAN ALAT BANTU**

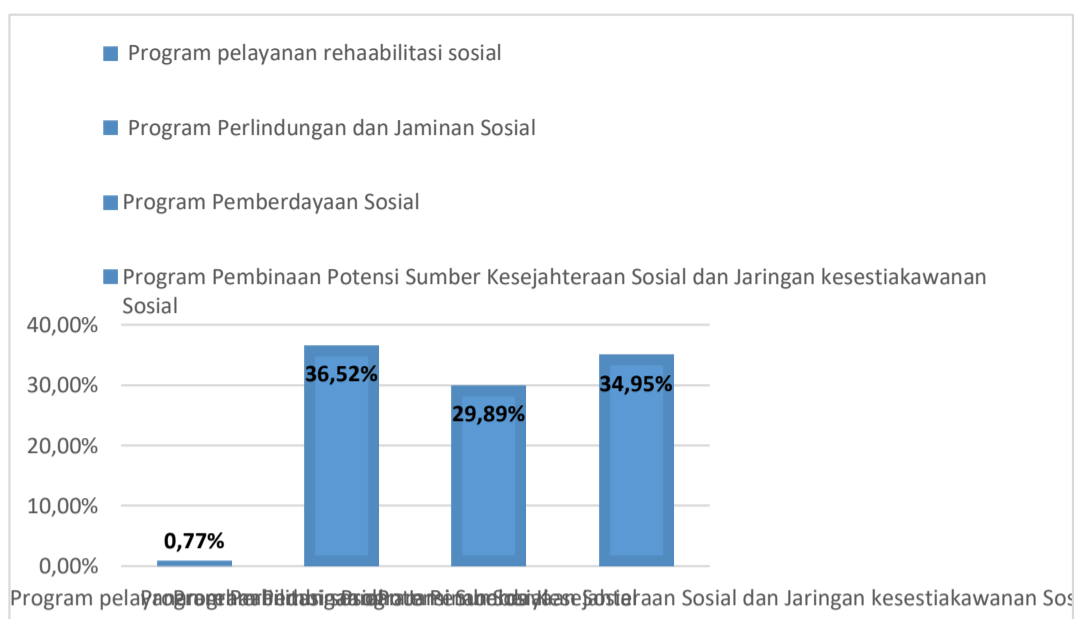
NO	URUSAN	IKK	NO IKK	RUMUSAN DAN PERMASALAHAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
1	2	3		4	5	6
	Bidang Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		
			A	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
				(550 orang : 655 orang x 100) =	83,96%	Dinas Sosial
			B	Jumlah anak terlantar/jalanan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
				(1779 Orang:2025 Orangx100) =	87,85%	Dinas Sosial
			C	Jumlah Lanjut Usia (LU) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
				(1632 Orang:2253 Orangx100) =	72,43%	Dinas Sosial
			D	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
				(217 Orang:280 Orang x100) =	77,50%	Dinas Sosial
			E	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		
				(4178 Orang : 5213Orang x 100) =	80,14%	Dinas Sosial

**Tabel 2.15**  
**JUMLAH KORBAN BENCANA YANG MENDAPATKAN MAKANAN**

NO	URUSAN	IKK	NO IKK	RUMUSAN DAN PERMASALAHAN	CAPAIAN KINERJA	KET.
1	2	3		4	5	6
	Bidang Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1	<b>Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan</b>		
		3917 Orang : 3217 x 1000 = 100 %	1	Mendapatkan Permakanan		
				(3917 Orang : 3217 Orang x 100)=	100,00%	Dinas Sosial

Standar pelayanan minimal yang telah dituangkan dalam peraturan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati Garut Nomor 163 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 472 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut .

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Garut tahun 2020 secara keseluruhan disajikan pada gambar sebagai berikut :



Pada tahun 2020 pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 sasaran dengan menggunakan 1 indikator yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2020. Dari 1 indikator yang diukur, sebanyak 1 (satu) indikator makro dalam penanganan kemiskinan (9,98 %) kemiskinan di Kab. Garut meningkat ditahun 2020 berdasarkan data dari BPS Kab. Garut dengan penjelasan sebagai berikut .

Perincian pencapaian sasaran pada tahun 2020 yang berkaitan dengan misi ke 1 (satu) yang di implementasikan pada program yang dapat dilihat pada tabel berikut :

### Misi 1

#### Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran.  <b>Indikator sasaran ;</b>  Persentase Penduduk Miskin	%	8,35	9,98	9,98



Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu :

1. Pertama, *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) ;
2. Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian secara global. Dampak ekonomi pandemi COVID-19 dimulai dari adanya guncangan terhadap suplai barang dan jasa yang tersedia di pasar (supply shock). Guncangan tersebut terjadi ketika orang-orang (mayoritas pekerja) dalam rantai produksi terinfeksi virus dan kemudian sakit. Kondisi ini menyebabkan penurunan tingkat produktivitas individu ataupun perusahaan. Guncangan terhadap suplai juga didorong oleh pembatasan aktivitas fisik (physical distancing) ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bagian dari upaya pengendalian penyebaran pandemi. Dua kebijakan tersebut mengakibatkan banyak pabrik, kantor, dan pusat bisnis ditutup untuk sementara.

**Tabel 2.16**  
**Target dan Realisasi Program/Indikator Kinerja Program**  
**Dinas Sosial Tahun 2020**

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target 2020 (%)	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi social	0,48%	0,77	
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persenttase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social	13,60%	36,52	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pemberdayaan social	0,03%	29,89	
4.	PROGRAM PEMBINAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN JARINGAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam kesejahteraan social	14,00	34,95	

Pencapaian kinerja tahun 2020 yang diimplementasikan ke dalam 49 kegiatan dengan 8 program, yaitu :

9. Program Pelayanan Rehaabilitas Sosial ;
10. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
11. Program Pemberdayaan Sosial ;
12. Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaring Kesetiakawanan Sosial ;
13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
14. Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur:
15. Program Peningkatan Disiplin Aparatur:
16. Program Peningkatan pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

### 2.3 Analisis Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Sosial)

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Garut tahun 2020 dapat dilihat pada capaian sasaran yaitu :

Pencapaian sasaran yang berkaitan dengan Misi ke-1 Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya

1. **Sasaran** : Menurunnya kemiskinan dengan **indikator sasaran** :  
Persentase penduduk miskin .

Perbandingan capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Garut sampai dengan tahun 2020 terhadap target RPJMD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini

#### **Sasaran 1 : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya**

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2019	Hasil Tahun 2020	Target Tahun 2020	Tercapai i/ Tidak	Hasil sampai dengan 2020	Target Akhir Renstra/ RPJMD
1	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran  <b>Indikator sasaran ;</b>  Persentase Penduduk Miskin	8,98	9,98	8,35	√	9,98	6,50

**Tabel 2.17**  
**RATA RATA CAPAIAN PROGRAM//INDIKATOR KINERJA PROGRAM**  
**PADA DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Program Indikator Kinerja Program	Hasil Tahun 2019	Hasil Tahun 2020	Target Tahun 2020	Tercapai / Tidak	Hasil sampa i dengan 2020	Target Akhir Renstra/ RPJMD
1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial <b>Indikator Kinerja Program:</b> Presentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial		0,76	0,48	√	0,76	0,66
2	Perlindungan dan Jaminan Sosial <b>Indikator Kinerja Program :</b> Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		36,52	13,60	√	36,52	17,085
3	Pemberdayaan Sosial <b>Indikator Kinerja Program :</b> Prsentase PPKS yang mendapatkan pemberdayaa n sosial		29,89	0,03	√	29,89	6,145
4	Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraa n dan Jaringan Kesetiakwana n Sosial <b>Indikator Kinerja Program :</b> Presentase PSKS yang aktif dalam kesejahteraan sosial		34,95	14,00	√	34,95	20,831

Deskripsi penjelasan pencapaian sasaran 1 :

Pada tahun 2020, dari 1 indikator semuanya mencapai/melebihi target, yaitu Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dapat memenuhi kebutuhan/dibantu sebesar 102,12% hal ini diuraikan :

1)Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial **Indikator Kinerja Program**

Program Presentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dengan target 0,48% dalam pencapaian program ditunjang oleh 11 kegiatan yang diimplementasikan pada kegiatan rutin, untuk pencapaian kinerja Program Pelayanan Rehabailitasi Sosial dengan capaian realisasinya dengan uraian , yaitu ;

No	Uraian	Target	Ket.
1.	Pelatihan keempilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Nakal Korban Narkotika (ANKN)	15 Orang	
2.	Pemberian Permakanan bagi Anak Asuh Terlantar dalam Panti	800 Org	
3.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	408 Org	
4.	Fasilitasi dan Asistensi Kesejahteraan Sosial bagi Orang dengan HIV/AIDS	40 Org	
5.	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi WTS (Wanita Tuna Sosial) diluar Panti	15 Org	
6.	Peningkatan sarana dan Prasarana dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Desaku Menanti)	1 dok	
7.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar/Jalanan diluar Panti	190 Org	
8.	Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Cacat/Disabilitas Dilaur Panti	140 Org	
9.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemias Diluar Panti	75 Org	
10.	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LU) Dilaur Panti	350 Org	
11.	Tersediaanya Bantuan bagi Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti yang Terkena Dampak Covid 19	500 Org	
12.	Bantuan untuk dampak Covid 19 bagi Penyandang Disabilitas(Provinsi Jawa Barat)	417 Org	
	Jumlah.....	3243 Org	

Dengan uraian capaian kinerja 3243 Org : 422469 (DTKS) x 100 = 0,77 % capaian program pelayanan rehabilitasi sosial tersebut diatas dalam pencapaiannya melebihi target .

- 2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial **Indikator Kinerja Program** program Presentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dengan target 13,60% dalam pencapaian program ditunjang oleh 4 kegiatan yang diimplementasikan pada kegiatan rutin, untuk pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian realisasinya, yaitu ;

No	Uraian	Target	Ket.
1.	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking)	20 Org	
2.	Pendamping Program Keluarga Harapan	150.056 KPM	
3.	Pelatihan Keterampilan bagi PPKS Migran Bermasalah	20 Org	
4.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	4200 Org	

Dengan uraian capaian kinerja 154.296 Org : 422469 (DTKS) x 100 = 36,52 % capaian Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut diatas dalam pencapaiannya melebihi target .

- 3) Program Pemberdayaan Sosial **Indikator Kinerja Program** Presentase PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial dengan target 0,03% dalam pencapaian program ditunjang oleh 7 kegiatan yang diimplementasikan pada kegiatan rutin, untuk pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial dengan capaian realisasinya, yaitu ;

No	Uraian	Target	Ket.
1.	Pelatihan Berusaha bagi Keluarga Miskin	400 Org	
2.	Pelatihan Keterampilan bagi PPKS Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	90 Orang	
3.	Keluarga Rentan Ekonomi (Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga)	40 Org	
4.	Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan FM	50 Org	
5.	Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	125699 KPM	
6.	Validasi dan Keluarga Miskin	1 Dok	
7.	Penyusunan Data PPKS	1 Dok	

Dengan uraian capaian kinerja 126279 Org : 422469 (DTKS) x 100 = 29,89% capaian Program Pemberdayaan Sosial tersebut diatas dalam pencapaiannya melebihi target.

- 4) Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial **Indikator Kinerja Program** Presentase PSKS yang aktif dalam kesejahteraan sosial dengan target 14,00% dalam pencapaian program ditunjang oleh 7 kegiatan yang diimplementasikan pada kegiatan rutin, untuk pencapaian kinerja Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial dengan capaian realisasinya, yaitu ;

No	Uraian	Target	Ket.
1.	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosrial	155 Org	
2.	Sosialisasi Perundang-Undangan Bidang Sosial	160 Org	
3.	Bimbinganan Sosial bagi PSKS	35 Org	
4.	Akreditasi Yayasan di Kabupaten Garut	25 Org	
5.	Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat (LAPAD RUHAMA)	3432 Org	
6.	Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Printis Kemerdekaan	100 Buku	
7.	Peningkatan Fasilitas Nilai-Nilai Keperintisan dan Kepahlawanan	20 Org	Janda PKRI

Dengan uraian capaian kinerja 4269 Org : 12214 (PSKS) x 100 = 34,95 % capaian Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial tersebut diatas dalam pencapaiannya melebihi target .

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2020 yang mendukung kepada pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

Pencapaian sasaran yang berkaitan dengan Misi ke-1 **Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya**

**Sasaran** : Menurunkan kemiskinan dan pengangguran, **Indikator sasaran** ; Persentase Penduduk Miskin, indikator sasaran tersebut diatas merupakan indikator makro yang ditangani oleh beberapa SKPD terkait, Dinas Sosial mengimplementasikan sasaran dan indikator sasaran pada program, yaitu :

1 Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial **Indikator Kinerja Program**

Program Presentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dengan target 0,48% dalam pencapaian program ditunjang oleh 11 kegiatan yang diimplementasikan pada kegiatan rutin, untuk pencapaian kinerja Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan capaian realisasinya, Dengan uraian capaian kinerja 3243 Org :  $422469 \text{ (DTKS)} \times 100 = 0,77 \%$  capaian program pelayanan rehabilitasi sosial tersebut diatas dalam pencapaiannya melebihi target .

2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial **Indikator Kinerja Program**

program Presentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dengan target 13,60% dalam pencapaian program ditunjang oleh 4 kegiatan yang diimplementasikan pada kegiatan rutin, untuk pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan capaian realisasinya, capaian kinerja 154296 Org :  $422469 \text{ (DTKS)} \times 100 = 36,52 \%$  capaian Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut diatas dalam pencapaiannya melebihi target .

3 Program Pemberdayaan Sosial **Indikator Kinerja Program** Presentase

PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial dengan target 0,03% dalam pencapaian program ditunjang oleh 7 kegiatan yang diimplementasikan pada kegiatan rutin, untuk pencapaian kinerja



Program Pemberdayaan Sosial dengan capaian realisasinya, yaitu Dengan uraian capaian kinerja 126279 Org : 422469 (DTKS) x 100 = 29,89% capaian Program Pemberdayaan Sosial tersebut diatas dalam pencapaiannya melebihi target .

4 Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial **Indikator Kinerja Program** Presentase PSKS yang aktif dalam kesejahteraan sosial dengan target 14,00% dalam pencapaian program ditunjang oleh 7 kegiatan yang diimplementasikan pada kegiatan rutin, untuk pencapaian kinerja Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial dengan capaian realisasinya, capaian kinerja 4269 Org : 12214 (PSKS) x 100 = 34,95 % capaian Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial tersebut diatas dalam pencapaiannya melebihi target .

Realisasi keuangan Dinas Sosial Kabupaten Garut tahun anggaran 2020 seperti tabel berikut :

**Tabel 2.18**  
**Relalisasi Anggaran Dinas Sosial**  
**Kabupaten Garut Tahun 2020**

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Saldo	%
1	2	3	4	5	6
1.	BELANJA	50.414.080.333,-	50.059.994.017,-	(354.086.316,-)	99,29
2.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.871.464.978,-	3.788.323.470,-	(83.141.508,-)	97,85
3	BELANJA LANGSUNG	11.323.097.355,-	10.537.092.547,-	(786.004.808,-)	93,06
4	Belanja Tidak Terduga (BTT)	35.219.518.000,-	34.734.578.000,-	(484.949.000)	98,62

Dari jumlah anggaran tersebut digunakan untuk mencapai **sasaran strategis** sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja .

APBD Kabupaten Garut sebesar Rp. 15.194.562.333,00 dan Dinas Sosial mendapatkan tambahan pagu anggaran dalam bentuk Bantuan Tidak Terduga (BTT) dalam penanganan Covid 19 sebesar Rp. 35.219.518,00 total pagu anggaran Rp. 50.414.080.333,- untuk penanganan PPKS, antara lain :

### 1) Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial.

**Sasaran** program ini adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Untuk mencapai sasaran tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.935.791.771,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.901.829.175,- atau sebesar (98,25%) yang diimplementasikan ke dalam 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan **Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak nakal korban narkoba (ANKN)**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.736.500,- dan terealisasi Rp. 63.461.000,- atau sebesar (99,57%) **Sasaran** dari kegiatan ini adalah meningkatnya keterampilan bagi anak nakal korban narkoba, **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya pelatihan bagi anak nakal korban narkoba sebanyak 15 orang Lokasi di Banjarwangi.
- b) Kegiatan Pemberian Permakanan Bagi Anak Asuh Terlantar Dalam Panti, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.403.800,- dan terealisasi Rp. 119.817.000,- atau sebesar (99,51%), **Sasaran** dari kegiatan ini adalah Tersedianya kebutuhan dasar bagi anak asuh terlantar dalam panti, **Hasil** Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak asuh terlantar dalam panti sebanyak 20 panti terdiri dari Pasundan ISTRI ( PASI ), Assalafiyah II, Assamsiyah, Fathimah, Al-amin, ,Baetul Mutaqin,Itihadul Umat, Ruhama, ,Assyipa, Taman Harapan Muhammaadiyah Cisaat, Bina Insani Utama, Nurul Huda Pulosari ,Yasfimiah , bani Ahmad, Yayasan Ali Jafar , Jalalen, Al Qolam, At taqwin, Harapawan Muhammadiyah, Karya Setiawan Al Gifari.
- c) Kegiatan **Pemberian Pendidikan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial** , dengan alokasi anggaran sebesar Rp.198.111.600,- dan terealisasi Rp. 196.505.600,- atau sebesar (99,19%), **Sasaran** dari kegiatan ini adalah Tersedianya eks penyandang penyakit sosial yang dapat dibina dan dilatih serta terampil, berusaha dibidang ternakdomba dan eks napi yang terpenuhinya kebutuhan dasar, **Hasil** Meningkatnya kemandirian

dan dapat bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat bagi eks penyandang penyakit social ( Eks Napi , dan Terpenuhinya kebutuhandasar bagi eks napi baru yang terdampak covid 19 ( sembako ).

- d) Kegiatan **Fasilitasi dan Asistensi Kesejahteraan Sosial Bagi Orang Dengan HIV/AIDS**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.736.500,- dan terealisasi Rp.63.412.100,- atau sebesar (99,49%), **Sasaran** dari kegiatan ini adalah orang dengan HIV/AIDS yang dibantu Kebutuhan Dasarnya dan Kekebalan daya tahanTubuh dalam rangka Penanganan dampak Covid-19, **Hasil** Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan kekebalan daya tahan tubuh bagi orang dg HIV/AIDS dalam rangka penanganan dampak Covid-19, adapun targetnya sebanyak 40 Orang.
- e) Kegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi WTS (Wanita Tuna Sosial) diluar Panti**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.607.200,- dan terealisasi Rp.51.548.900,- atau sebesar (96,16%), **Sasaran** dari kegiatan ini adalah orang dengan eks WTS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, **Hasil** Meningkatnya eks WTS yang trampil dan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya, adapun targetnya sebanyak 15 Orang.
- f) Kegiatan **Peningkatan Sarana dan Prasarana Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Desaku Menanti)**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.550.000,- dan terealisasi Rp.50.435.000,- atau sebesar (99,77%), **Sasaran** dari kegiatan ini adalah Tersusunya DED Sarana dan Prasarana penanganan gelandangan dan pengemis., **Hasil** Tersedianya DED untuk Pengadaan Pembangunan sarana dan prasarana dalam penanganan gelandangan pemulung dan pengemis di Desaku Menanti, adapun targetnya sebanyak 1 dokumen.
- g) Kegiatan **Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar/Jalanan Diluar Panti**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.147.576.000,- dan terealisasi Rp.146.597.000,- atau sebesar (99,34%), **Sasaran** dari kegiatan ini adalah Anak Terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang dan pangan), **Hasil** Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya keterampilan bagi anak terlantar/jalanan diluar panti, adapun targetnya sebanyak 190 anak terlantar/jalanan.

- h) Kegiatan **Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Cacat/Disabilitas Diluar Panti**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.477.769.171,- dan terealisasi Rp.476.753.400,- atau sebesar (99,79%), **Sasaran** dari kegiatan ini adalah Tersedianya kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, **Hasil** Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penyandang cacat/disabilitas diluar panti, adapun targetnya sebanyak 140 Orang.
- i) Kegiatan **Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.158.472.000,- dan terealisasi Rp.157.004.625,- atau sebesar (99,07%), **Sasaran** dari kegiatan ini adalah Tersedianya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis diluar panti, **Hasil** Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis diluar panti, adapun targetnya sebanyak 75 Orang.
- j) Kegiatan **Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LU) Diluar Panti**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.601.829.000,- dan terealisasi Rp.576.294.000,- atau sebesar (95,76%), **Sasaran** dari kegiatan ini adalah Tersedianya kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia (LU) diluar panti, **Hasil** Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Lanju Usia (LU) diluar panti, adapun targetnya sebanyak 360 Orang.

## 2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

**Sasaran** program ini adalah meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk mencapai sasaran tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.950.512.184,- dan terealisasi sebesar Rp.3.274.646.880,- atau sebesar (82,89%) yang diimplementasikan ke dalam 4 (empat) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan **Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan anak (trafficking)** dengan anggaran sebesar Rp. 120.272.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 119.460.500,- atau sebesar (99,32%) **Sasaran** dari kegiatan ini adalah perlindungan dan jaminan sosial bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak (Trafficking), **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya keterampilan bagi korban tindak kekerasan , sebanyak 20 orang, dengan lokasi Kecamatan Cibalong Ds. Najatan.

- b) Kegiatan **Pendamping Program Keluarga Harapan** , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 688.400.000,- dan terealisasi Rp. 686.840.000,- atau sebesar (99,77%) **Sasaran** dari kegiatan ini adalah meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi pendampingan KPM PKH, sebanyak 42 Kecamatan.
- c) Kegiatan **Pelatihan Keterampilan Bagi PPKS Migran Bermasalah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.120.037.500,- dan terealisasi sebesar Rp.119.425.500,- atau sebesar (99,49%), **Sasaran** dari Kegiatan ini adalah meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS Migran Bermasalah, sebanyak 20 Orang Kec. Cisewu Ds.Cikarang.
- d) Kegiatan **Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial** dengan anggaran sebesar Rp.3.021.802.184,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.348.920.880,- atau sebesar (77,73), **Sasaran** dari kegiatan ini meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah tersedianya bantuan logistik tanggap darurat bagi korban bencana alam dan sosial, sebanyak 4000 jiwa, dengan lokasi Dinas Sosial Kab. Garut, 42 Kecamatan se-Kabupaten Garut.

### 3) Program Pemberdayaan Sosial

**Sasaran** program ini adalah meningkatnya pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), Untuk mencapai sasaran tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.884.295.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.847.268.800,- atau sebesar (98,03%) yang diimplementasikan ke dalam 5 (lima) kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan **Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.412.402.000,- dan terealisasi Rp.405.915.000,- atau sebesar (98,43), Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), sebanyak 400 Org dengan lokasi Kec. Cisurupan Pamulihan dan jaring pengaman sosial dampak Covid 19 bagi keluarga miskin.

- b) Kegiatan **Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial WRSE**, dengan anggaran sebesar Rp. 186.101.500,- dan terealisasi sebesar Rp.171.991.500,- atau sebesar (92,42%). **Sasaran** dari kegiatan ini meningkatnya pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) bagi Keluarga wanita rawan sosial ekonomi, Adapun **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah terwujudnya keluarga wanita rawan sosial ekonomi yang mandiri dan maju, sebanyak 90 KK. Dengan lokasi P2WKSS, (Kec. Ciompet Ds.Jatisari dan Ds. Cikondang dan Kec. Garut Kota Kelurahan Margawati dan Kel.Cimuncangi Ds. Bojong).
- c) Kegiatan **Keluarga Rentan Ekoomi (Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga)**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.161.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 105.506.000,- atau sebesar (94,91%), **Sasaran** dari Kegiatan ini adalah meningkatnya pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), kelaurga rentan sosial ekonomi yang didasarkan kesetiakawanan sosial bagi keluarga rentan ekonomi, Adapun **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kemampuan, kemandirian dalam berusaha serta dapat bersosialisasi dengan masyarakat dilingkungannya, dengan lokasi : Kec. Lewigoong dan Cibalong, sebanyak 40 KK.
- d) Kegiatan **Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan FM**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.582.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.035.000,- atau sebesar (90,92%) **Sasaran** dari Kegiatan ini adalah meningkatnya pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), dalam kapasitas kinerja pendamping Fakir Miskin, Adapun **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah kemampuan petugas pendamping Fakir Miskin yang memahami konsep pemberdayaan sosial, dengan lokasi : Dinas Sosial, sebanyak 50 Orang.
- e) Kegiatan **Pendampingan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.239.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 76.439.750,- atau sebesar (96,47%), **Sasaran** dari Kegiatan ini adalah meningkatnya pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), pada Kualitas dan Kuantitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi KPM, Adapun **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah Pendampingan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Bagi

KPM, dengan lokasi : 42 Kecamatan se-Kab.Garut dengan jumlah pendamping 50 Orang.

- f) Kegiatan **Validasi Data Keluarga Miskin** , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 771.591.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 766.191.750,- atau sebesar (99,30%), **Sasaran** dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), dalam akurasi data keluarga miskin (BDT atau dan DTKS), Adapun **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah data keluarga fakir miskin (BDT atau dan DTKS) yang akurat dan valid. Lokasi : se-Kab. Garut, sebanyak 1 dokumen.
- g) Kegiatan **Validasi Data PPKS** , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 299.564.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 299.189.000,- atau sebesar (99,87%), **Sasaran** dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS), dalam akurasi data PPKS. Adapun **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akurat dan valid. Lokasi : se- Kab. Garut, sebanyak 1 dokumen.

#### **4) Program Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Jaringan Kesetiakawanan Sosial**

**Sasaran** program ini adalah meningkatnya PSKS yang mampu menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai sasaran tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.016.501.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.008.569.205,- yang diimplementasikan ke dalam 7 (Tujuh) kegiatan, yaitu :

- a) Kegiatan **Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (PSM,KT)**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.549.993.250,-. dan terealisasi sebesar Rp.549.993.250,-. **Sasaran** dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kinerja kelembagaan KT, TKSK, dan PSM yang aktif .**Hasil** yang dicapai adalah Jumlah pengurus KT, yang terampil dalam manajemen penyelenggaraannya, jumlah KT,TKSK dan PSM yang meningkat kinerjanya, dan Jumlah TKSK dan PSM meningkat jangkauan kinerja pelayannya pada PPKS. sebanyak 40 KT, 42 TKSK, 100 PSM dan 1 LKS.

- b) Kegiatan **Sosialisasi Perundang-Undangan Bidang Sosial**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.258.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.258.000,- atau sebesar (100%). **Sasaran** dari kegiatan ini adalah meningkatnya PSKS yang mampu menyelenggarakan kesejahteraan sosial . Adapun **Hasil** yang dicapai adalah Jumlah penyelenggara kesejahteraan sosial yang memahami manajemen kesejahteraan sosial sebanyak 160 Tokoh Masyarakat, aparatur tingkat kecamatan dengan lokasi Kec. Malangbong, Cibiuk, Sukawening, dan Karang Tengah.
- c) Kegiatan **Bimbingan Sosial Bagi PSKS**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.492.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.492.000,- atau sebesar (100%), **Sasaran** dari kegiatan ini adalah meningkatnya meningkatnya PSKS yang mampu menyelenggarakan kesejahteraan sosial, adapun **Hasil** yang dicapai adalah Jumlah PSKS yang mampu menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PPKS, sebanyak 35 Orang. lokasi Kec. Samarang.
- d) Kegiatan **Akreditasi Yayasan di Kabupaten Garut**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.416.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.416.000,- atau sebesar (100%). **Sasaran** dari kegiatan ini adalah meningkatnya meningkatnya PSKS yang mampu menyelenggarakan kesejahteraan sosial, **Hasil** yang dicapai adalah Jumlah Yayasan/LKS yang terakreditasi di Kab. Garut sebanyak 25 LKS lokasi Dinas sosial.
- e) Kegiatan **Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat (LAPADRUHAMA)**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.192.412.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.191.599.855,- atau sebesar (99,93%). **Sasaran** dari kegiatan ini adalah meningkatnya meningkatnya PSKS yang mampu menyelenggarakan kesejahteraan sosial, **Hasil** yang dicapai adalah Jumlah masyarakat miskin yang dilayani melalui LAPAD RUHAMA sebanyak 442 Ds/Kel. LKS lokasi Dinas sosial.
- f) Kegiatan **Pengembangan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Printis Kemerdekaan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 134.345.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 127.225.800,- atau sebesar (94,70%). **Sasaran** dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman pelajar tentang nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan dan Janda PKRI yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, **Hasil** yang dicapai adalah Jumlah pelajar yang memahami nilai-nilai keperintisan dan



kepahlawana serta Janda PKRI yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, sebanyak Pelajar yang mengikuti pengetahuan tentang Kepahlawanan sebanyak 100 orang dengan lokasi SMK 11 Kadungora Kab. Garut janda PKRI 20 Orang lokasi Kec. Sukawening , Kec. esmi, Kec. Garut Kota, Kec. Pangatikan, Kec. Pakenjeng, Tarogong Kidul, Karang Tengah, Cilawu, Kadungora dan Bungbulang.

- g) Kegiatan **Peningkatan Fasilitasi Nilai-Nilai Keperintisan dan Kepahlawanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.584.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.584.300,- atau sebesar (100%). **Sasaran** dari kegiatan ini adalah Meningkatkan pemahaman pelajar tentang nilai-nilai keperintisan dan kepahlawanan dan pahlawan daerah menjadi pahlawan nasional, **Hasil** yang dicapai adalah Jumlah buku pahlawan daerah serta usulan pahlawan daerah menjadi pahlawan nasional, sebanyak 100 buku.

#### 5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

**Sasaran** dari Program ini adalah meningkatnya kinerja aparatur, untuk mencapai sasaran tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp. 687.032.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 666.453.087,- atau (97,00) yang diimplementasikan kedalam ini 13 (tiga belas) kegiatan, yaitu :

- a) Kegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.279.587,- atau sebesar (97,34%) **Sasaran** kegiatan ini yaitu Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Operasional telepon air, listrik dan speedy selama 12 bulan.
- b) Kegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.024.800,- atau sebesar (43,41%) **Sasaran** kegiatan ini yaitu Meningkatkan keinerja pegawai dalam melaksanakan tugas. **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan yang layak untuk di pergunakan, 15 unit.
- c) Kegiatan Penyediaan **Jasa Kebersihan Kantor** dengan alokasi anggaran Rp. 44.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.300.000,- atau sebesar (100%) **Sasaran** kegiatan ini yaitu Meningkatkan kinerja dan pelayanan. **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah alat-alat kebersihan dan alat rumah tangga yang baik selama 12 bulan.

- d) Kegiatan **Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja** dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 24.992.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.915.000,- atau sebesar (99,69%) **Sasaran** kegiatan ini yaitu Meningkatnya pemeliharaan peralatan kerja. **Hasil** terpenuhinya alat-alat kerja seperti komputer, mesin tik dll selama 12 bulan.
- e) Kegiatan **Penyediaan Alat Tulis Kantor**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.000.000,- atau sebesar (100%). **Sasaran** kegiatan ini yaitu Terpenuhinya penyediaan ATK. **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah atk yang dibutuhkan selama 12 bulan.
- f) Kegiatan **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 55.938.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.938.000,- atau sebesar (100%). **Sasaran** kegiatan ini yaitu Meningkatnya kinerja aparatur. **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan.
- g) Kegiatan **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.000.000,- atau sebesar (100%). **Sasaran** kegiatan ini yaitu Meningkatnya kinerja aparatur. **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah instalasi listrik /penerangan bangunan kantor dinas. selama 12 bulan.
- h) Kegiatan **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.130.093.000,- atau sebesar (97,81%). **Sasaran** kegiatan ini yaitu Tersedianya alat-lat dan perlengkapan kantor yang memadai. **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kinerja aparatur, sebanyak 11 jenis.
- i) Kegiatan **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.900.000,- atau sebesar (100%). **Sasaran** kegiatan ini yaitu meningkatnya kinerja aparatur. **Hasil** Meningkatnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan bidang social, sebanyak 38 jenis.
- j) Kegiatan **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.792.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.792.000,- atau sebesar (100%). **Sasaran** kegiatan ini yaitu meningkatnya pengetahuan aparatur tentang

perundang-undangan. *Hasil* yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah bahan bacaan perundang-undangan dan informasi kerja yang dibutuhkan. Selama 12 bulan.

- k) Kegiatan **Penyediaan Makanan dan Minuman**, dengan alokasi anggaran Rp. 14.520.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 14.520.000,- atau sebesar (100%). **Sasaran** kegiatan ini yaitu Terpenuhinya kebutuhan makan tamu dan makan minum rapat, **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah tersedianya makan tamu dan makan minum rapat dinas. Selama 12 bulan.
- l) Kegiatan **Rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.690.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 69.690.400,- atau sebesar (100%). **Sasaran** kegiatan ini yaitu Meningkatnya hubungan kedinasan dan lembaga-lembaga/intansi. **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah. selama 12 bulan.
- m) Kegiatan **Rapat-rapat Pembinaan ke Dalam Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.000.000,- atau sebesar (100%). **Sasaran** kegiatan ini yaitu Meningkatnya hubungan kedinasan dan lembaga-lembaga/instansi. **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan selama 12 bulan.

#### 6) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

**Sasaram** dari Program ini adalah Meningkatnya sarana dan prasaran kondisi yang baik, untuk mencapai sasaran tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp. 635.823.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 627.497.000,- atau sebesar (99,98%) yang diimplementasikan kedalam ini 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- a) Kegiatan **Pengadaan kendaraan Dinas/Oprasional** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 327.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 327.750.000,- atau sebesar (99,98%) **Sasaran** kegiatan ini yaitu Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/oprasional. **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kinerja aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya yang memadai sebanyak 1 unit kendaraan roda 4 (empat) dan 1 unit kendaraan roda 2 (dua).
- b) Kegiatan **Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.870.000,- atau sebesar (96,07%) **Sasaran** kegiatan ini yaitu

Tersedianya pengadaan perlengkapan kantor yang memadai. **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor sebanyak 5 jenis.

c) Kegiatan **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.023.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.877.700,- atau sebesar (95,98%) **Sasaran** kegiatan ini yaitu Terpeliharanya gedung/kantor tempat bekerja. **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur sebanyak 1 paket.

d) Kegiatan **Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau sebesar (100%). **Sasaran** kegiatan ini yaitu Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas. **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas yang berfungsi, sebanyak 20 unit.

#### 7) **Program Peningkatan Disiplin Aparatur .**

**Sasaran capaian kinerja dan keuangan** dari Program ini adalah Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dengan dukungan anggaran Rp. 158.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 157.687.000,- atau sebesar (99,30%), yang diimplementasikan kedalam ini 1 (satu) kegiatan yaitu :

a) Kegiatan **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 158.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 157.687.000,- atau sebesar (99,30%), **Sasaran** kegiatan ini yaitu Tersedianya seragam TKSK dan Tagana, **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kinerja TKSK dan Tagana, sebanyak 116 stel.

#### 8) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .**

**Sasaran capaian kinerja dan keuangan** dari Program ini adalah Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dukungan anggaran Rp. 54.764.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.140.000,- atau sebesar (97,79%), yang diimplementasikan kedalam ini 1 (satu) kegiatan yaitu :

a) Kegiatan **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.764.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.564.000,- atau

sebesar (84,54) **Sasaran** kegiatan ini yaitu Tersedianya laporan bulanan, triwulan dan LAKIP, **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya penyusunan laporan kinerja Dinas Sosial, sebanyak 1 Dokumen.

- b) Kegiatan **Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP), SP dan Pengukuran IKM** dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.576.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.576.500,- atau sebesar (100) **Sasaran** kegiatan ini yaitu Tersedianya laporan IKM Dinas Sosial, **Hasil** yang dicapai dari kegiatan ini adalah Meningkatnya penyusunan laporan IKM Dinas Sosial, sebanyak 2 Dokumen.

**Tabel 2.17**  
**Realisasi dan Capaian Kinreja Bantuan Tidak Terduga (BTT)**  
**Pencegahan dan Percepatan Penanganan Dampak Covid 19**  
**Pada Dinas Sosial Kab. Garut**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	PAGU	REALISASI PAGU	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kegiatan TAGANA untuk Membantu Dapur Umum, Makan dan Minum Petugas Posko Penanganan Covid 19	TAGANA 76 ORG, Penjaga Pos 260 Org Warga yg dicheck poin 2200 org	TAGANA 76 ORG, Penjaga Pos 260 Org Warga yg dicheck poin 2200 org	Rp. 549.500.000	Rp. 357.000.000	65,44%	
2.	Pengadaan Bahan Pangan Bagi Warga yang Terdampak dan Terindikasi (ODP/PDP)	1.500 Org ODP/PDP	1.500 Org ODP/PDP	Rp.1.199.450.000	Rp.1.160.666.000	96,76%	
3.	Pengadaan Bahan Pangan Bagi Masyarakat yang terindikasi Secara Medis dan Secara Ekonomi yang Terdampak Covid 19 (bantuan tunia dlm Bentuk uang)	25.555 Org terdampak secara ekonomi, 3.000 Org terdampak secara medis	25.555 Org terdampak secara ekonomi, 3.000 Org terdampak secara medis	Rp.10.140.110.000	Rp.10.027.010.000	98,88%	
4.	Penjemputan Warga Garut yang Terdampak Covid 19 yang Terlantar di Provinsi Papua	19 Orang	19 Orang	Rp.130.770.000	Rp.130.770.000	100%	
5.	Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terhadap Covid 19 Secara Ekonomi dan Pekerja yang terkena PHK Dampak Covid 19	25.555 Orang terdampak ekonomi, 130 Orang yang terkena PHK	25.555 Orang terdampak ekonomi, 130 Orang yang terkena PHK	Rp.8.025.720.000	Rp.8.002.620.000	99,71%	
6.	Bantuan Sosial Bagi Mubaligh dan Pekerja Seni Terdampak Covid 19	5.083 Orang Mubaligh dan Pekerja Seni	5.083 Orang Mubaligh dan Pekerja Seni	Rp. 1.597.896.000	Rp.1.574.496.000	98,53%	
7.	Bantuan Sosial Bagi masyarakat terdampak Covid 19 secara Ekonomi, Terkena PHK, Mubaligh, Pekerja Seniman	25.555 Orang Secara Ekonomi, 130 Orang Terkena PHK, 4.500 Orang Mubaligh, 583 Orang Pekerja Seni	25.555 Orang Secara Ekonomi, 130 Orang Terkena PHK, 4.500 Orang Mubaligh, 583 Orang Pekerja Seni	Rp. 9.605.416.000	Rp.9.521.488.000	99,11%	
8.	Bantuan dalam Bentuk Bahan Pangan Bagi Warga/Masyarakat yang Terdampak Covid 19 Secara Kelinis	1000 Orang	1000 Orang	Rp.705.500.000	Rp.705.500.000	100%	
9.	Bantuan dalam Bentuk Bahan Pangan dan Ekonomi yang terkena dampak Covid 19 bagii Masyarakat Terindikasi ODP, Terkena PHK, Mubaligh dalam bentuk sembako dan Tunai.	2.000 Terindikasi ODP/PDP (Sembako), 130 Orang Terkena PHK, 2.5 Orang Mubaligh,	2.000 Terindikasi ODP/PDP (Sembako), 130 Orang Terkena PHK, 2.6 Orang Mubaligh,	Rp.2.343.156.000	Rp.2.296.428.000	98,00%	
10	Tersediaanya bantuan bagi disabilitas dan lanjut usia terlantar diluar panti yang terkena dampak Covid 19	Lanjut usia 500 orang dan disabilitas 500 orang.	Disabilitas 486 Org dan Lanjut Usia 494 Orang	Rp. 920.000.000	Rp. 902.000.000	98,04%	

## **2.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial .**

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian mengenai:

- ✓ Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, diuraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten / Kota dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- ✓ Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- ✓ Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) / SDGs;
- ✓ Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Garut mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Garut sebagai berikut.

- a) Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan.

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

b) **Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)**

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sisual (PPKS) bidang Sosial.

c) **Tingginya Jumlah Penduduk Miskin Dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.**

Kabupaten Garut merupakan daerah yang memiliki keragaman yang besar, baik dari segi wilayah, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Sebagai sebuah daerah berkembang, Kabupaten Garut memiliki tantangan untuk terlepas dari kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu



daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Tidak ada faktor tunggal yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan, karena kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Diperlukan langkah komprehensif yang mampu mencakup seluruh aspek untuk mengatasi kemiskinan. Untuk itu perlu dicari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan hingga menyebabkan timbulnya kepadatan penduduk miskin di suatu wilayah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Sen dalam Kuncoro (2015) menyatakan bahwa masalah riil yang dialami oleh negara berkembang adalah rendahnya kualitas kehidupan. Pembangunan manusia diinterpretasikan sebagai proses untuk memperoleh *entitlement* dan kapabilitas manusia untuk memperoleh taraf hidup sesuai yang diinginkannya. Kualitas sumber daya manusia yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas tenaga kerja dan penduduk menurun, pada akhirnya akan menyebabkan tingkat pendapatan yang diperoleh juga rendah. Gambaran tingkat kualitas sumber daya manusia dapat diketahui melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

- d) Belum Terintegrasinya Penanganan Penduduk Miskin Dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ;

Sesungguhnya tidak banyak bedanya upaya penanggulangan kemiskinan dipertanian dibandingkan dengan di pedesaan. Namun karena cakupan, kondisi dan tingkatnya yang agak berbeda satu sama lain, maka fokus, sasaran dan penekanan upaya penanggulangan

kemiskinan tersebut dapat berbeda antara untuk daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Garut dalam pelaksanaan masih dilakukan oleh masing- masing SKPD tidak secara terintegrasi penanganan penduduk miskin, walaupun dalam RPJMD pelaksanaan pembangunan dilakukan secara terintegrasi antar SKPD dalam penanganan penduduk miskin di Kabupaten Garut.

e) Jangkauan, Mutu Dan Akses Pelayanan Sosial Dasar Masih Kurang.

- Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar bagi Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS ) masih kurang dan belum optimal peran berbagai pihak termasuk masyarakat dalam memberdayakan kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial masyarakat yang belum efektif ;
- Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal;
- Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang memadai dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang diharapkan;

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Garut. Keberadaan sumber daya Dinas Sosial Kabupaten Garut yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis dalam penanganan dan Pelayanan bagi Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam memberikan pelayanan kesejahteraan Sosial pada bidang social.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Dinas Sosial Kabupaten Garut :

1. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Sumber Daya Manusia yang tersedia dirasakan belum cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada sudah mencukup untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Pendidikan formal Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi perencana masih sangat sedikit, demikian pula halnya yang berkaitan dengan pelayanan bidang sosial (pendidikan kesejahteraan sosial ) . Sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah, dengan ini diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manuasia yang berkualitas secara memadai.

## **2.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Renja 2022 Dinas Sosial Kabupaten Garut sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarannya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Pada saat penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Garut berkenaan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dikaitkan dengan Permendagri 90 Tahun 2018 tentang Tingkat keberhasilan Dinas Sosial tahun 2022 dapat dilihat dari indikator dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Garut tahun 2022 secara keseluruhan . Berikut ini akan diuraikan review terhadap Renja RKPD tahun 2020 Kecamatan Tampan berdasarkan tabel T-C.31 di bawah ini

Tabel 2.19 ( T.C 31)  
 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
 Dinas Sosial Kabupaten Garut

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Krgiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>									
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Meningkatnya perencanaan program/kegiatan dan sub.kegiatan prioritas Dinas Sosial	<b>80,00</b>	<b>21.574.639.744</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul</b>	Meningkatnya perencanaan program/kegiatan dan sub.kegiatan prioritas Dinas Sosial	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul</b>	<b>Meningkataanya penyusunan domumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah</b>							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun.	3 Dokumen	95.590.000					
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah tersusunnya dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30.250.000					
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	30.250.000					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Krgiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah tersusunnya dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	30.250.000					
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	30.250.000					
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersedianya dokumen pelaporan yang tersusun (LKPJ, LAKIP)	2 dokumen	210.540.000					
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersedianya laporan hasil evaluasi kinerja (IKM, LPPD)	2 dokumen	73.205.000					
II	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	<b>Meningkatnya kinerja ANS dan laaporan administrasi keuangan dinas</b>							
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN DKP	1 Tahun	6.158.710.339					
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersusunnya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Tahun	24.200.000					
3	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Terlaksananya koordinasi penyusunan akuntansi SKPD	1 Tahun	24.200.000					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	3 laporan	60.500.000					
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	12 laporan	66.550.000					
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Laporan dan prognosis realisasi anggaran	12 laporan	42.350.000					
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Meningkatnya pelaksanaan administrasi barang milik daerah</b>							
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	149.359.405					
2	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang daerah SKPD	1 tahun	30.250.000					
3	Penata usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersedianya panta usahaan barang milik daerah SKPD	1 tahun	30.250.000					
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN</b>							
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai yang diadakan	1 paket	146.410.000					
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersedianya pakaian ASN dan kelengkapannya	68 stel	123.420.000					
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah sumberdaya pegawai yang ditingkatkan kualitasnya	1 paket	423.500.000					
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undang	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah sumberdaya pegawai yang memahami peraturan perundang-undangan kepegawaian.	68 orang	242.000.000					
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	<b>Meningkatnya kinerja ASN dalam melaksanakan administrasi</b>							
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah peralatan listrik yang dibeli	11 jenis	344.850.000					
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan alat tulis kantor yang tersedia	1 paket	635.250.000					
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersedianya peralatan rumah tangga SKPD	1 paket	423.500.000					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Krgiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	1 paket	181.500.000					
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah majalah dan surat kabar yang berlangganan	1 paket	42.350.000					
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah makan tamu dan makan minum rapat dinas	1 paket	133.100.000					
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Fasilitasi rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan ke dalam daerah	1 paket	423.500.000					
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Meningkatnya pelaksanaan tugas ASN pada bidang Sosial</b>							
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dibeli (roda empat)	3 unit	726.000.000					
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli (roda dua) dan roda 4 (empat)	5 unit roda dua 1 unit roda empat	961.950.000					
3	Pengadaan Mebel	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersedianya mebeler kantor untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan bidang sosial	1 paket	219.615.000					
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah gedung/kantor/bangunan lainnya yang dibangun dan Tersedianya fasilitas dan sarana penanganan PPKS di Sosial center	2 unit gedung kantor lainnya	8.470.000.000					
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	1 paket	151.250.000					
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	1 paket	151.250.000					
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Meningkatnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas administrasi bidang sosial</b>							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Tersedianya jasa surat menyurat	1 paket	12.100.000					



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Krgiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Pemenuhan biaya tagihan telepon, air dan listrik	1 tahun	349.690.000					
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	1 paket	169.400.000					
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 paket	337.590.000					
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Meningkanya pemeliharaan saran dan prasarana untuk keancaran dalam melaksanakan tugas administrasi bidang sosial</b>							
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajak	24 unit	121.000.000					
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	24 unit	423.500.000					
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Gedung kantor yang terpeliharaan	1 paket	217.800.000					
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul	Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	1 paket	169.400.000					
5	<b>URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
6	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>									
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>Meningkatnya PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial</b>	<b>0,03</b>	<b>4.991.250.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Kabupaten Garut</b>	<b>Meningkatnya PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>IX</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>		<b>Meningkatnya Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mengikuti pelatihan</b>							
1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Kabupaten Garut	Jumlah KAT yang mengikuti pemberdayaan sosial	<b>48 KK</b>	181.500.000					
2	Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Kabupaten Garut	Jumlah pendampingan KAT dalam peningkatan kesejahteraan sosial	<b>48 KK</b>	181.500.000					

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Krgiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Meningkatnya pemahaman masyarakat pada tatacara pengumpulan sumbangan dan pengumpulan barang</b>							
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kabupaten Garut	Jumlah PSKS yang mengikuti sinkronisasi pemberian izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB).	73 orang	151.250.000					
XI	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Meningkatnya pengembangan potensi pekerja sosial masyarakat dalam pemberdayaan sosial.</b>							
1	Peningkatan Kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah PSM yang mengikuti pengembangan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Jumlah PUSKESOS yang dapat membantu masyarakat miskin.	80 PSM 442 Puskesmas	665.500.000					
2	Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah TKSK yang mengikuti bimtek dalam penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial	42 Orang	1.028.500.000					
3	Peningkatan Kemampuan Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah PSKS dalam pemberdayaan sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) & Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga(AKSK) dan Jumlah keperintisan kemerdekaan dapat terpenuhinya kebutuhan dasar janda PKRI.	70 WRSE 70 AKSK 20 JANDA PKRI	726.000.000					
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah KT, LKS yang mengikuti peningkatan kemampuan potesni dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	60 KT 33 LKS	302.500.000					
5	Peningkatan Daya Manuai dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kabupaten Garut	Jumlah masyarakat miskin yang dilayanan melalui (LAPAD RUHAMA) dan LK3	42 Kec 442 Desa	1.815.000.000					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Krgiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Meningkatnya penanganan/pelayanan warga negara migran korban tindak kekerasan	0,03	484.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kabupaten Garut	Meningkatnya penanganan/pelayanan warga negara migran korban tindak kekerasan	0,03	0,00
XII	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		Meningkatnya warga negara migran tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	48 Orang	484.000.000					
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kabupaten Garut	Jumlah warga negara migran yang terfasilitasi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal, serta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan.	48 Orang	484.000.000					
D	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi social.	0,50	8.021.106.940	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kabupaten Garut	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi social.	0,50	0,00
XIII	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial							
1	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar	300, 120, 170, 80	535.704.510					
2	Penyediaan Sandang	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan sandang	300, 120, 170, 80	460.979.750					
3	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan alat bantu	300, 120, 170, 80	344.421.660					
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan reunifikasi	300, 120, 170, 80	535.704.510					
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, sepirtual dan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	300, 120, 170, 80	535.704.510					
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapatkan Bimbasn sosial .bagi keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	60	193.600.000					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Krgiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapatkan fasilitas NIK, Surat Nikah, dan KIA	300, 170, 120, 80	424.347.000					
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapatkan akses layanan pendidikan bagi LU, Disabilitas, Anak terlantar, dan Gepeng diluar panti.	300, 170, 120, 80	363.000.000					
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan data dan pengadua dalam pemenuhan kebutuhan dasar	300, 170, 120, 80	310.970.000					
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan	42	483.395.000					
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga (di Sosial Center)	42	302.500.000					
12	Pemberian Layanan Rujukan	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan rujukan	42	181.500.000					
<b>XIV</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>		<b>Meningkatnya PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi sosial</b>							
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan, data dan pengaduan dilaur koranb HIV/AIDS dan NAPZA .	42	163.350.000					
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, kedaruratan bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	42	157.300.000					
3	Penyediaan Permakanan	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, permakanan bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	42	363.000.000					

1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Krgiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4	Penyediaan Sandang	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, sandang bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	55	336.380.000					
5	Penyediaan Alat Bantu	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, sandang alat bantu bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	55	242.000.000					
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, kedaruratan bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	30	181.500.000					
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, bimbingan fisik mental, sepiritual, dan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	45	181.500.000					
8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, bimbingan sosial pada keluarga bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya diluar panti).	100	302.500.000					
9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yanga mendapatkan pelayanan pembuatan NIK, Surat Nikah dan NIK	75	163.350.000					
10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan akses pelayanan, pendidikan dan kesehatan bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	70	290.400.000					
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga (di Sosial Center)	42	181.500.000					
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	42	181.500.000					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Krgiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Pemberian Layanan Rujukan	Kabupaten Garut	Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan rujukan	42	181.500.000					
14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah kerjasama dan kemitraan dalam penanganan PPKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	5	423.500.000					
<b>D</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosialnya</b>	<b>17,10</b>	<b>6.866.750.000</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Kabupaten Garut</b>	<b>Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosialnya</b>	<b>17,10</b>	<b>0,00</b>
<b>XV</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>		<b>Meningkatnya anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial</b>							
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Garut	Jumlah anak terlantar/jalanan yang penjangkauan dan dilatih.	36	199.650.000					
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kabupaten Garut	Jumlah anak terlantar/jalanan yang mendapatkan pelayanan rujukan	36	163.350.000					
3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kabupaten Garut	Jumlah anak terlantar/jalanan yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan	36	332.750.000					
<b>XVI</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Tersedianya data Fakir Miskin yang valid pada dokumen data, masyarakat miskin (Fakir Miskin) yang mendapatkan fasilitasi bantuan sosial dan dilatih</b>							
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah data Fakir Miskin yang valid pada dokumen data	1	1.754.500.000					
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah pengolahan data FM yang valid pada dokumen data .	1	1.754.500.000					
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Garut	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan sosial/ Terwujudnya pendampingan BPNT bagi KPM, dan Jumlah pendamping PKH yang mampu meningkatkan pelayanan pada KPM	42	1.694.000.000					
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Garut	Jumlah keluarga miskin yang dilatih bidang perekonomian bagi FM pedesaan, perkotaan dan pesisir	77 , 80 , 89	968.000.000					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Krgiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Meningkatnya pelayanan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial .	0,30	4.277.350.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Meningkatnya pelayanan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial .	0,30	0,00
XVII	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Tersedianya bahan bantuan bagi korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasarnya.				Kabupaten Garut			
1	Penyediaan Makanan	Kabupaten Garut	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan.	4.175	1.206.370.000					
2	Penyediaan Sandang	Kabupaten Garut	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan sandang.	4.175	479.160.000					
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kabupaten Garut	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan tempat penampungan	4.175	605.000.000					
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kabupaten Garut	Jumlah korban bencana alam dan sosia bagi kelompok rentan I yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.	726	479.160.000					
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kabupaten Garut	Jumlah korban bencana alam dan sosia bagi kelompok rentan I yang mendapatkan pelayanandukungan psikososial.	726	479.160.000					
XVIII	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Meningkatnya Desa/Kelurahan yang mengikuti pemberdayaan terhadap kesiap siagaan bencana Kab. Garut							
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kabupaten Garut	Jumlah (KSB) sebagai wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat	5	242.000.000					
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kabupaten Garut	Jumlah Tarunas Siaga Bencana yang dapat meningkatkan kapasitas dalam penanganan bencana alam dan sosial	61	786.500.000					

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program, Krgiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Meningkatnya pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan	0,30	605.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Kabupaten Garut	Meningkatnya pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan	0,30	0,00
XIX	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Tersedianya pemeliharaan makam pahlawan nasional Kab Garut	3	605.000.000					
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten.	1	163.350.000					
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah taman makam pahlawan nasional kabupaten yang terpelihara	1	296.450.000					
3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah taman makam pahlawan nasional kabupaten yang terjaga	1	145.200.000					



**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN 2022**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.**

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Garut tahun 2022 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Garut Tahun 2022.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Propinsi.

Tujuan dan sasaran strategis pembangunan bidang sosial Kabupaten Garut dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran strategis pembangunan bidang sosial tingkat nasional yang dituangkan melalui :

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Minimal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **3.1.1 Kebijakan Nasional**

Dinas Sosial Kabupaten Garut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 145 Tahun 2019 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Garut . Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Garut merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Dinas Sosial dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten Garut, dengan visi **“Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :

#### **Pelayanan yang prima bidang sosial**

Makna yang terkandung adalah didalam pengembangan implementasi pelayanan bidang Sosial yang unggul dan memenuhi kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan inovasi mewujudkan kecepatan dan akurasi pelayanan bidang sosial.

#### **Profesional**

Transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik Antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin

kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai dalam bidang sosial.

### **Akuntabel**

Makna dari akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance).

Dan Misi 1 (satu) Dinas sosial dari Kepala Daerah Terpilih :

Mewujudkan Kualitasn Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Sehat, Cerdas, dan Berbudaya.

Memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Garut yang dimana Dinas Sosial berada Pada Misi ke 1 (satu) tersebut di atas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang sosial setiap kebijakan pelayanan bidang sosial beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), agar setiap keputusan/kebijakan pelayanan bidang sosial dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya. Sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik berkaitan dengan bidang sosial akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan bidang sosial akan meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik bidang sosial.

Terkait dengan kebijakan nasional Dinas Sosial Kabupaten Garut selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah, Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tahun 2022 diprioritaskan pada pelayanan dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui, yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, yang dilakukan melalui :
  - ✦ PPKS yang mendapatkan layanan dasar ;
  - ✦ PPKS yang mendapatkan layanan sandang ;
  - ✦ PPKS yang mendapatkan layanan alat bantu ;
  - ✦ PPKS yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga ;
  - ✦ PPKS yang mendapatkan bimbingan fiski, mental, sepiritual dan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar ;
  - ✦ PPKS yang mendapatkan Bimbingasn sosial .bagi keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan dasar ;

- ✦ PPKS yang mendapatkan fasilitasi NIK, Surat Nikah, dan KIA ;
- ✦ PPKS yang mendapatkan akses layanan pendidikan bagi LU, Disabilitas, Anak terlantar, dan Gepeng diluar panti ;
- ✦ PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan ;
- ✦ PPKS yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga (di Sosial Center) ;
- ✦ PPKS yang mendapatkan layanan rujukan.

2. Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, yang dilakukan melalui :

- Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan ;
- Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan sandang ;
- Korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan tempat penampungan ;
- Korban bencana alam dan sosia bagi kelompok rentan 1 yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar ;
- Korban bencana alam dan sosia bagi kelompok rentan yang mendapatkan pelayanandukungan psikososial.

### **3.1.2 Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat**

Perubahan struktur penduduk ini membuka peluang untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic deviden*) dengan prasyarat agar memiliki dampak positif adalah SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Periode tahun 2021 – 2023 pembangunan kesejahteraan sosial ditujukan untuk membentuk

sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Dengan demikian pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pengendalian penduduk dan tata kelola kesejahteraan sosial, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif dengan memperhatikan kebutuhan penduduk penyandang disabilitas, anak dan lansia.

Sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan antara lain: 1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti 2) kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan, dan 3) sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial. Sinergitas dan koordinasi kelembagaan antar pemerintah harus dilakukan secara efektif dan efisien terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dalam struktur kewenangan pemerintahan, dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Untuk itu diperlukan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Rentra Dinas Sosial . Tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan visi dan misi Bupati Terpilih . Adapun visi Bupati terpilih Kabupaten Garut adalah : **“Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**.

Penjelasan makna kata-kata kunci dalam visi adalah sebagai berikut :

1. **Bertaqwa** adalah Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan prilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat ;
2. **Maju** adalah Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi ;
3. **Sejahtera** adalah Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Visi Bupati terpilih Kabupaten Garut, maka ditetapkan 1 (satu) Misi sebagai berikut :

**1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya.**

Selanjutnya nilai-nilai organisasi yang dapat dikembangkan untuk mencapai visi dan misi, antara lain modal sosial yaitu semangat kebersamaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun unsur-unsur modal sosial antara lain :

1. Partisipasi : yaitu keselarasan, kebebasan, kebersamaan untuk bekerja secara sungguh-sungguh.
2. Reciprocity : yaitu semangat untuk saling tukar kebaikan/membantu secara ikhlas antar sesama pegawai.
3. Trust : yaitu sikap saling percaya sesama pegawai.
4. Proaktif : yaitu tindakan proaktif, antisipatif senantiasa mencari jalan keluar setiap permasalahan yang muncul, dengan kata lain tidak reaktif (bertindak setelah ada permasalahan).

Untuk menggambarkan secara spesifik indikator keberhasilan, maka dari setiap tujuan tersebut ditetapkan sasaran dengan indikator sasaran, sehingga dapat lebih memudahkan dalam pengukurannya.

Tujuan yaitu hal-hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh SKPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam



kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan target masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik.

Strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan Arah kebijakan dari masing-masing misi Bupati terpilih Kabupaten Garut tersebut adalah sebagai berikut :

**Misi 1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya.**

**Tujuan :**

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia

**Indikator Tujuan :**

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanganan bidang sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

**Sasaran :**

Menurunnya kemiskinan.

**Indikator Sasaran :**

Persentase penduduk miskin ;

**Strategi :**

1. Peningkatan Pelayanan dasar dan optimalisasi system perlindungan sosial yang koperhensif bagi penduduk miskin dan rentan ;
2. Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin ;
3. Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

**Arah Kebijakan :**

1. Pendampingan program bantuan pangan non tunai (BPNT) ;
2. Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak yatim, lanjut usia ;
3. Pemberdayaan kelembagan kesejahteraan sosial ;

4. Integrasi Pelayanan dan Rujukan Perlindungan Sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat) ;
5. Peningkatan kemampuan, kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial Secara Lembaga dan Berkelanjutan.

**Program** :

1. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial ;
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ;
3. Program Pemberdayaan Sosial ;
4. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ;
5. Program Penanganan Bencana ;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan ;
7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Untuk mendukung Visi dan Misi, Tujuan, dan Sasaran, kepala Daerah terpilih, Indikator Kinerja Utama (IKU) pada bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Garut, yaitu :

**VISI : "GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA"**

**MISI : MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN MASAUARAKAT  
YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS, DAN BERBUDAYA.**

<b>TUJUAN</b>	:	Meningkatkan Penyelenggaraan Layanan Terpadu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	:	Terpenuhinya kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pelayanan kesejahteraan sosial
<b>SASARAN</b>	:	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
<b>INDIKATAOR SASARAN</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Persentase PPKS yang dilayani Rehabilitasi Sosial ;</li> <li>✓ Persentase PPKS yang dilayani Perlindungan dan Jaminan Sosial ;</li> <li>✓ Persentase PPKS yang dilayani Pemberdayaan Sosial.</li> </ul>
<b>STRATEGI</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Peningkatan pelayanan dasar dan optimalisasi sistem perlindungan sosial yang koperhensif bagi penduduk miskin dan rentan ;</li> <li>❖ Pemberdayaan ekonomi kelompok miskindan rentan miskin ;</li> <li>❖ Pengembangan sinergitas, kolaborasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ;</li> <li>❖ Peningkatan patisipasi masyarakat dalam upayapenanggulangan kemiskinan.</li> </ul>
<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan Program Bantuan Panagan Non Tunai (BPNT) ;</li> <li>• Perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, anak yatim, lanjut usia ;</li> <li>• Pemberdayaan kelembagaaan kesejahteraan sosial ;</li> <li>• Pelatihan kerja usaha mandiri bagi masyarakat miskin berbasis pengembangan perekonomian perdesaan ;</li> <li>• Integrasi Pelayanan dan Rujukan perlindungan sosial (Layanan Terpadu Rumah Harapan Masyarakat) ;</li> <li>• Peningkatan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial secara lembaga dan berkelanjutan.</li> </ul>

Tabel 3.1  
Capaian Program Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program  
Pada Dinas Sosial Kab. Garut

No	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
				2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir	
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Program Pemberdayaan	Persentase PPKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	%	0,02	3.788	0,03	4.166	0,03	4.583	0,04	4.583	0,04	17.120
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	0,49	5.549	0,50	6,166	0,51	6.783	0,66	7.461	0,66	25.959
3	Program Pelindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	16,30	4.333	17,10	21,50	21,50	5.296	28,20	5.826	28,20	20,270
4	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan jaminan sosial	%	0,03	198	0,03	221	0,03	243	0,04	257	0,04	929
5	Program Penanganan Bencana	Persentase pelayanan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial	%	0,21	3.287	0,30	3.652	0,14	4.017	1,82	4.419	1,82	15.375
6	Program Pengelolaan Taman Makam Paahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dan dipelihara dengan baik	%	0,25	514	0,30	572	0,33	629	0,50	692	0,50	2.407

Tabel 3.2  
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Garut

<b>VISI :</b>	<b>"GARUT YANG BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA"</b>
<b>MISI :</b>	<b>MENINGKATNYA KUALITAS KEHIDUPAN MASAUARAKAT YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS, DAN BERBUDAYA.</b>

No.	URAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	Keterangan
		2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>TUJUAN :</b>					
	Meningkatkan Penyelenggaraan Layanan Terpadu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.					
	<b>INDIKATOR TUJUAN :</b>					
	Terpenuhinya kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui pelayanan kesejahteraan sosial					
	<b>SASARAN :</b>					
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					
	<b>INDIKATAOR SASARAN :</b>					
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					
	✓ Persentase PPKS yang dilayani Rehabilitasi Sosial ;	: 0,74%	0,80%	0,84%	1,16%	
	✓ Persentase PPKS yang dilayanai Perlindungan dan Jaminan Sosial ;	: 16,33 %	17,43%	21,86%	28,75%	
	✓ Persentase PPKS yang dilayani Pemberdayaan Sosial.	: 18,20%	19,90%	21,59%	23,60%	

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Garut tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan program dan kegiatan :

Salah satu indikator utama keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah Kabupaten/kota dapat dilihat dari angka kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial ;
- b. Pelayanan sosial ;
- c. Penyiapan akses kesempatan kerja dan berusaha ;
- d. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar ;
- e. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar ;
- f. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.

Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk :

1. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemauan berusaha bagi masyarakat miskin ;
2. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan .

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :

- Jumlah program dan kegiatan :  
Jumlah program 7 Program ;  
Jumlah kegiatan 19 kegiatan ;  
Jumlah Sub. Kegiatan 95 Sub. Kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu )

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tersebar keberbagai kawasan, yaitu : Penyuluhan dan bimbingan sosial ; Pelayanan sosial ; Pemberdayaan FM, KAT dan PPKS lainnya ; Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial ; Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma ; Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo ; Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, WTS, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) ; Pembinaan anak terlantar/anak jalanan dan Jaminan dan perlindungan sosial; Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai kejuangan kepahlawanan. Yang fokus dalam pelaksanaan bidang sosial pada saat ini yaitu ; penanggulangan kemiskinan dalam Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunia.

Sesuai dengan target sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis tahun 2019-2024, rencana kinerja tahun 2022 sesuai dengan capaian pada misi sebagai berikut :



### Misi 1

**Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya.**

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Menurunnya kemiskinan.  <b>Indikator Sasaran :</b> Persentase penduduk miskin ;	%	7,43

Untuk mendukung Misi, Sasaran, dan Indikator Sasaran kepala Daerah terpilih, Indikator Kinerja Utama (IKU) pada bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Garut, yaitu :

### Misi 1

**Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya**

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).  <b>Indikator Sasaran :</b>		
	✓ Persentase PPKS yang dilayani Rehabilitasi Sosial ;	%	0,80
	✓ Persentase PPKS yang dilayani Perlindungan dan Jaminan Sosial ;	%	17,43
	✓ Persentase PPKS yang dilayani Pemberdayaan Sosial.	%	19,90

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL**

#### **4.1 Rencana Kegiatan 2022**

Program Dinas Sosial merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Sosial kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Sosial. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk pelayanan bidang sosial dan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan

bidang sosial dan standar pelayanan minimum merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan bidang sosial dan standar pelayanan minimum pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor public (pelayanan bidang sosial) memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan public (pelayanan bidang sosial) yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Garut yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

**Tabel 4.1**  
**KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA**  
**TAHUN 2019-2024**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
Meningkatkan Penyelenggaraan Layanan Terpadu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	✓ Persentase PPKS yang dilayani Rehabilitasi Sosial ;	%
		✓ Persentase PPKS yang dilayani Perlindungan dan Jaminan Sosial ;	%
		✓ Persentase PPKS yang dilayani Pemberdayaan Sosial.	%

Sesuai Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2019-2024 memiliki strategi dalam pencapaian tujuan yang diwujudkan dalam kebijakan dan program serta diimplementasikan melalui kegiatan untuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 telah disusun Rencana Kerja sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2022 sebesar **Rp. 37.653.294.780,- (Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Meningkatnya perencanaan program/kegiatan dan sub.kegiatan prioritas Dinas Sosial	
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya penyusunan dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun.	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah tersusunnya dokumen RKA-SKPD	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah tersusunnya dokumen DPA-SKPD	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan yang tersusun (IKM)	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan hasil evaluasi kinerja (LKPJ, LAKIP, LPPD)	
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kinerja ANS dan laporan administrasi keuangan dinas	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN DKP	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Tersusunnya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	
3	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan akuntansi SKPD	

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun	
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan dan prognosis realisasi anggaran	
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya pelaksanaan administrasi barang milik daerah	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penyediaan jasa keamanan kantor	
2	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang daerah SKPD	
3	Penata usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya panta usahaan barang milik daerah SKPD	
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai yang diadakan	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian ASN dan kelengkapannya	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumberdaya pegawai yang ditingkatkan kualitasnya	
4	Sosialisari Perturan Perundang-undang	Jumlah sumberdaya pegawai yang memahami peraturan perundang-undangan kepegawaian.	
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Meningkatkan kinerja ASN dalam melaksanakan administrasi	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang dibeli	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan alat tulis kantor yang tersedia	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga SKPD	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah dan surat kabar yang berlangganan	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan tamu dan makan minum rapat dinas	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan ke dalam daerah	
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Meningkatnya pelaksanaan tugas ASN pada bidang Sosial	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dibeli (roda empat)	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli (roda dua) dan roda 4 (empat)	
3	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair yang dibeli	
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor/bangunan lainnya yang dibangun dan Tersedianya fasilitas dan sarana penanganan PPKS di Sosial center dan sarana prasarana desaku menanti	
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas administrasi bidang sosial	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan biaya tagihan telepon, air dan listrik	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk keancaran dalam melaksanakan tugas administrasi bidang sosial	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajak	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terpelihara	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Meningkatnya PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial</b>	
<b>IX</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mengikuti pelatihan</b>	
1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KAT yang mengikuti pemberdayaan sosial	
2	Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Jumlah pendampingan KAT dalam peningkatan kesejahteraan sosial	
<b>X</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya pemahaman masyarakat pada tatacara pengumpulan sumbangan dan pengumpulan barang	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah PSKS yang mengikuti sinkronisasi pemberian izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB).	
<b>XI</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya PSKS dalam pelayanan penanganan bidang sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang mengikuti pengembangan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Jumlah PUSKESOS yang dapat membantu masyarakat miskin..	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang mengikuti bimtek dalam penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS dalam pemberdayaan sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) & Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga(AKSK) dan Jumlah keperintisan kemerdekaan dapat terpenuhinya kebutuhan dasar janda PKRI.	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi SumberKesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	JumlahKT, LKS yang mengikuti peningkatan kemampuan potesni dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusi dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah masyarakat miskin yang dilayanan melalui (LAPAD RUHAMA) dan LK3	

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Meningkatnya penanganan/pelayanan warga negara migran korban tindak kekerasan</b>	
<b>XII</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	Jumlah warga negara migran tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran yang terfasilitasi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal, serta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan.	
<b>D</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi social.</b>	
<b>XIII</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan sandang	
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan alat bantu	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan reunifikasi	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah PPKS yang mendapatkan Bimbingan sosial .bagi keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PPKS yang mendapatkan fasilitasi NIK, Surat Nikah, dan KIA	
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS yang mendapatkan akses layanan pendidikan bagi LU, Disabilitas, Anak terlantar, dan Gepeng diluar panti.	
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan data dan pengaduan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga (di Sosial Center)	
12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan rujukan	
<b>XIV</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi sosial	
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan, data dan pengaduan diluar korban HIV/AIDS dan NAPZA .	
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, kedaruratan bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	



No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
3	Penyediaan Permakanaan	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, permakanaan bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	
4	Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, sandang bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	
5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, sandangalat bantu bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, kedaruratan bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, bimbingan fisik mental, sepiritual, dan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	
8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, bimbingan sosial pada keluarga bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya diluar panti).	
9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PPKS yanga mendapatkan pelayanan pembuatan NIK, Surat Nikah dan NIK	
10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan akses pelayanan, pendidikan dan kesehatan bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga (di Sosial Center)	
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	
13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan rujukan	
14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama dan kemitiaan dalam penanganan PPKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	
<b>E</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosialnya	
<b>XV</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar/jalanan yang penjangkauan dan dilatih.	
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar/jalanan yang mendapatkan pelayanan rujukan	
3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar/jalanan yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan	
<b>XVI</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah data Fakir Miskin yang valid pada dokumen data	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Fakir Miskin yang valid pada dokumen data	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengolahan data FM yang valid pada dokumen data .	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan sosial/ Terwujudnya pendampingan BPNT bagi KPM, dan Jumlah pendamping PKH yang mampu meningkatkan pelayanan pada KPM	
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin yang dilatih bidang perekonomian bagi FM pedesaan, perkotaan dan pesisir	

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Meningkatnya pelayanan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial .	
<b>XVII</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasarnya.	
1	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan.	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan sandang.	
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan tempat penampungan	
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana alam dan sosial bagi kelompok rentan l yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.	
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosial bagi kelompok rentan l yang mendapatkan pelayanandukungan psikososial.	
<b>XVIII</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti pemberdayaan terhadap kesiap siagaan bencana Kab. Garut	
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah (KSB) sebagai wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tarunas Siaga Bencana yang dapat meningkatkan kapasitas dalam penanganan bencana alam dan sosial	
<b>G</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Meningkatnya pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan	
<b>XIX</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</b>	Tersedianya pemeliharaan makam pahlawan nasional Kab Garut	
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten.	
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan nasional kabupaten yang terpelihara	
3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan nasional kabupaten yang terjaga	

**Tabel 4.1**  
**Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2022**

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Plafon	Ket.
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	Meningkatnya perencanaan program/kegiatan dan sub.kegiatan prioritas Dinas Sosial			
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Meningkatakannya penyusunan dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun.	3 Dokumen	79.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah tersusunnya dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah tersusunnya dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen pelaporan yang tersusun (IKM)	2 Laporan	174.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan hasil evaluasi kinerja (LKPJ, LAKIP, LPPD)	3 Laporan	174.000.000	
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kinerja ANS dan laporan administrasi keuangan dinas			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN DKP	1 Tahun	5.089.843.255	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Tersusunnya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
3	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi penyusunan akuntansi SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya pelaksanaan administrasi barang milik daerah			
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penyediaan jasa keamanan kantor	1 Tahun	123.437.525	
2	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang daerah SKPD	1 Tahun	25.000.000	
3	Penata usahaah Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya panta usahaah barang milik daerah SKPD	1 Tahun	25.000.000	
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN			
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung disiplin pegawai yang diadakan	2 Paket	121.000.000	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian ASN dan kelengkapannya	55 Potong	102.000.000	
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumberdaya pegawai yang ditingkatkan kualitasnya	1 paket	125.000.000	
4	Sosialisari Perturan Perundang-undang	Jumlah sumberdaya pegawai yang memahami peraturan perundang-undangan kepegawaian.	68 Orang	50.000.000	

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Plafon	Ket.
1	2	3	4	5	6
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Meningganya kinerja ASN dalam melaksanakan administrasi			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik yang dibeli	9 Jenis	285.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dan alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	250.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga SKPD	1 Paket	100.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	1 Paket	100.000.000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah dan surat kabar yang berlangganan	1 Paket	35.000.000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan tamu dan makan minum rapat dinas	1 Paket	110.000.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan ke dalam daerah	1 Tahun	250.000.000	
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya pelaksanaan tugas ASN pada bidang Sosial			
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dibeli (roda empat)	1 Unit	500.000.000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli (roda dua) dan roda 4 (empat)	6 Unit, 1 unit	795.000.000	
3	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair yang dibeli	1 Paket		
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor/bangunan lainnya yang dibangun dan Tersedianya fasilitas dan sarana penanganan PPKS di Sosial center dan sarana prasarana desaku menanti	2 Unit	8.500.000.000	
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	1 Paket	125.000.000	
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung/kantor/bangunan lainnya yang diadakan	1 Paket	125.000.000	
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas administrasi bidang sosial			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun	10.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan biaya tagihan telepon, air dan listrik	1 Tahun	250.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	1 Paket	100.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	200.000.000	
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkanya pemeliharaan saran dan prasarana untuk keancaran dalam melaksanakan tugas administrasi bidang sosial			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terpelihara dan terbayarkan pajak	18 Unit	70.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	16 Unit	300.000.000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang terpeliharaan	4 unit	180.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	4 Unit	140.000.000	

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Plafon	Ket.
1	2	3	4	5	6
<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Meningkatnya PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial</b>			
<b>IX</b>	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Jumlah Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mengikuti pelatihan</b>			
1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah KAT yang mengikuti pemberdayaan sosial	50 KK	150.000.000	
2	Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Jumlah pendampingan KAT dalam peningkatan kesejahteraan sosial	50 KK	150.000.000	
<b>X</b>	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya pemahaman masyarakat pada tatacara pengumpulan sumbangan dan pengumpulan barang</b>			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah PSKS yang mengikuti sinkronisasi pemberian izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB).	60 Lembaga /masyarakat	125.000.000	
<b>XI</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya PSKS dalam pelayanan penanganan bidang sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>			
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM yang mengikuti pengembangan potensi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Jumlah PUSKESOS yang dapat membantu masyarakat miskin..	80 PSM/ 442 Ds, Kel	250.000.000	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang mengikuti bimtek dalam penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial	42 Org	800.000.000	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS dalam pemberdayaan sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) & Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga(AKSK) dan Jumlah keperintisan kemerdekaan dapat terpenuhinya kebutuhan dasar janda PKRI.	70 (WRSE), 70 (AKSK), 20 Janda PKRI	600.000.000	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi SumberKesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	JumlahKT, LKS yang mengikuti peningkatan kemampuan potesni dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	50 KT, 25 LKS,	250.000.000	
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusi dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah masyarakat miskin yang dilayanan melalui (LAPAD RUHAMA) dan LK3	42 Kec, 442 Ds/Kel	1.500.000.000	
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>Meningkatnya penanganan/pelayanan warga negara migran korban tindak kekerasan</b>			
<b>XII</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban TindakKekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>Jumlah warga negara migran tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan dipulangkan ke Desa/Keluarahan asal</b>			
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga negara migran yang terfasilitasi untuk dipulangkan ke Desa/Keluarah asal, serta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan.	40 Orang	221.000.000	

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Plafon	Ket.
1	2	3	4	5	6
D	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi social.			
XIII	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial			
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan dasar	300 LU, 170 ANAK TERLANTAR, 120 DISABILITAS, 80 GEPENG	442.731.000	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan sandang	300 LU, 170 ANAK TERLANTAR, 120 DISABILITAS, 80 GEPENG	380.975.000	
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan alat bantu	300 LU, 120 DISABILITAS,	284.646.000	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan reynufukasi	300 LU, 170 ANAK TERLANTAR, 120 DISABILITAS, 80 GEPENG	442.731.000	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan bimbingan fiski, mental, sepiritual dan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	300 LU, 170 ANAK TERLANTAR, 120 DISABILITAS, 80 GEPENG	442.731.000	
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah PPKS yang mendapatkan Bimngasn sosial bagi keluarganya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	50 KK	160.000.000	
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PPKS yang mendapatkan fasilitasi NIK, Surat Nikah, dan KIA	300 LU, 170 ANAK TERLANTAR, 120 DISABILITAS, 80 GEPENG	350.700.000	
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS yang mendapatkan akses layanan pendidikan bagi LU, Disabilitas, Anak terlantar, dan Gepeng diluar panti.	300 LU, 170 ANAK TERLANTAR, 120 DISABILITAS, 80 GEPENG	300.000.000	
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan data dan pengadua dalam pemenuhan kebutuhan dasar	300 LU, 170 ANAK TERLANTAR, 120 DISABILITAS, 80 GEPENG	257.000.000	
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan	42 Kecamatan	399.500.000	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga (di Sosial Center)	42 Kecamatan	250.000.000	
12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan rujukan	42 Kecamatan	150.000.000	
XIV	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, rehabilitasi sosial			
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan, data dan pengaduan dilaur koranb HIV/AIDS dan NAPZA .	42 Kecamatan	135.000.000	
2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, kedaruratan bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	30 Orang	130.000.000	

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Plafon	Ket.
1	2	3	4	5	6
3	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, permakanan bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	55 Orang	278.000.000	
4	Penyediaan Sandang	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, sandang bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	55 Orang	200.000.000	
5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, sandang alat bantu bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	30 Orang	150.000.000	
6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, kedaruratan bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	45 Orang	150.000.000	
7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS lainnya yang mendapatkan pelayanan, bimbingan fisik mental, sepiritual, dan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	55 Orang	278.000.000	
10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan akses pelayanan, pendidikan dan kesehatan bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	100 Orang	350.000.000	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga (di Sosial Center)	75 Orang	135.000.000	
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	70 Orang	240.000.000	
10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan akses pelayanan, pendidikan dan kesehatan bagi eks penyandang penyakit sosial lainnya.	42 Kec.	150.000.000	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga (di Sosial Center)	42 Kec.	150.000.000	
12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	42 Kec.	150.000.000	
13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan rujukan	42 Kec.	150.000.000	
14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama dan kemitraan dalam penanganan PPKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	5 Lembaga	350.000.000	
<b>E</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Meningkatnya PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosialnya			
<b>XV</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial			
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar/jalanan yang penjangkauan dan dilatih.	30 anak	165.000.000	
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar/jalanan yang mendapatkan pelayanan rujukan	30 anak	135.000.000	
3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar/jalanan yang mendapatkan pelayanan pemeliharaan	30 anak	175.000.000	
<b>XVI</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah data Fakir Miskin yang valid pada dokumen data			
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Fakir Miskin yang valid pada dokumen data	1 Dok	1.000.000.000	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengolahan data FM yang valid pada dokumen data .	1 Dok	1.000.000.000	

No	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Plafon	Ket.
1	2	3	4	5	6
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan sosial/ Terwujudnya pendampingan BPNT bagi KPM, dan Jumlah pendamping PKH yang mampu meningkatkan pelayanan pada KPM	42 Kec	800.000.000	
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin yang dilatih bidang perekonomian bagi FM pedesaan, perkotaan dan pesisir	70, KK, 75 KK, 80 KK	1.400.000.000	
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Meningkatnya pelayanan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial .			
<b>XVII</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasarnya.			
1	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan.	3450 Jiwa	997.000.000	
2	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan sandang.	3450 Jiwa	396.000.000	
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan tempat penampungan	3450 Jiwa	345.000.000	
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana alam dan sosia bagi kelompok rentan I yang mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.	600 Org	266.000.000	
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosia bagi kelompok rentan I yang mendapatkan pelayanandukungan psikososial.	60 Org	256.000.000	
<b>XVIII</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti pemberdayaan terhadap kesiap siagaan bencana Kab. Garut			
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah (KSB) sebagai wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat	3 Ds/Kel	200.000.000	
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlaha Tarunas Siaga Bencana yang dapat meningkatkan kapasitas dalam penanganan bencana alam dan sosial	61 Orang	650.000.000	
<b>G</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Meningkatnya pelayanan pengelolaan taman makam pahlawan			
<b>XIX</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</b>	Tersedianya pemeliharaan makam pahlawan nasional Kab Garut			
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten.	1 paket	135.000.000	
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan nasional kabupaten yang terpelihara	1 paket	245.000.000	
3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah taman makam pahlawan nasional kabupaten yang terjaga	1 paket	120.000.000	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan penting dalam Penyusunan Renja**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Garut tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2019-2020. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berfikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja eisien dan efektif.

#### **5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (penanganan Kemiskinan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS) yang berkuslitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 tersebut, di dalam pelaksanaan harus menerapkan prinsip – prinsip efisiensi, efektivitas,

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Sosial Kabupaten Garut tahun 2022, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang ;
2. Renja Dinas Sosial Kabupaten Garut tahun 2022 memfokuskan pada pencapaian target dari indicator SPM dan MDG's. Oleh sebab itu, seluruh elemen pegawai Dinas Sosial, TKSK, KT, Pekerja Sosial (Peksos), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Orsos untuk bekerja lebih fokus untuk mencapai target SPM dan MDG's ;
3. Dalam melaksanakan kegiatan di Tahun Anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang terkaitan ;
4. Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN ;
5. Rencana Kerja (Renja) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomi dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Garut) ;
6. Renja Dinas Sosial Tahun 2022, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelaksanaan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh KT, PSM, TKSK, Orsos dan masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka KT, PSM, TKSK, Orsos dan masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi KT, PSM, TKSK, Orsos dan masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan system informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi KT, PSM, TKSK, Orsos dan masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perubahan paradigma pembangunan Kesejahteraan Sosial (penanganan Kemiskinan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS) ;
2. Terbangunya peran serta KT, PSM, TKSK, Orsos dan masyarakat dan dunia usaha dalam segala bentuk dan tahapan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (penanganan Kemiskinan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS) dalam rangka membantu mempercepat pencapaian Kesejahteraan Sosial masyarakat yang layak ;

3. Terwujudnya partisipasi aktif KT, PSM, TKSK, Orsos dan masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan Kesejahteraan Sosial (penanganan Kemiskinan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/PPKS) ;
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Demikian Renja Dinas Sosial Kabupaten Garut tahun 2022 ini disusun sebagai pelaksanaan dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta menjadi acuan penyusunan RKA Dinas Sosial Kabupaten Garut pada Tahun 2022.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**